

# MENGGANTANG ASA

**Media Massa dalam Wacana  
Keadilan Pangan di Indonesia  
— GROW Award 2015**

Penerbitan buku ini didukung oleh Oxfam. Semua pandangan dan pendapat dalam buku ini adalah pandangan dan pendapat para penulis serta tidak sekali-kali mencerminkan atau mewakili pendapat atau pandangan Oxfam.

## **MENGGANTANG ASA**

**Media Massa dalam Wacana Keadilan Pangan di Indonesia**

**— GROW Award 2015**

### **DEWAN JURI**

**KATEGORI CETAK-ONLINE**

Harry Surjadi, Jurnalis Senior

Renjani Puspo Sari, AJI

Tejo Wahyu Jatmiko, ADS

Dini Widiastuti, OXFAM

**KATEGORI FOTO**

Ng Swan Ti, PannaFoto Institute

Arbain Rambey, Kompas

Cici Riesmasari, OXFAM

Rully Kesuma, Tempo

**Penyelaras Akhir:** Bayu Wardhana

**Cetakan Pertama:** Februari 2015

**Penerbit:**



**AJI INDONESIA**

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Jl Kembang Raya No.6 Kwitang, Senen

Jakarta Pusat 10240

[www.aji.or.id](http://www.aji.or.id) @ajiindo

**Didukung oleh:**



**OXFAM**

# KATA PENGANTAR AJI

**S**etidaknya, ada tiga hal saat ini menjadi ancaman terkait isu pangan. Laju pertumbuhan penduduk tinggi, yang mengakibatkan permintaan pangan meningkat. Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim, berpotensi anomali iklim dan mengancam ketidapastian produksi hingga gagal panen. Serta adanya persaingan pangan untuk konsumsi dan bioenergi, yang menambah parah kelangkaan pangan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat tentang pentingnya isu pangan masih rendah. Publik masih sebatas merespon soal ketersediaan pangan dan harga. Sementara masalah produksi, ketersediaan lahan, perlindungan pangan lokal, tingkat gizi dan nutrisi, diversifikasi pangan, maupun mengenai kondisi produsen pangan, belum banyak diketahui masyarakat luas.

Selain itu, banyak potensi pangan yang dimiliki negara, tidak didukung karena kebijakan yang dipilih masih cenderung pada impor pangan. Padahal Indonesia memiliki beraneka ragam jenis pangan yang masih dapat dimanfaatkan dengan lebih baik lagi, seperti pembuatan tepung dari bahan umbi, diversifikasi bahan makanan pokok selain beras dapat digantikan dengan jagung atau sagu, serta masih banyak lagi pangan lokal yang belum dimanfaatkan dengan baik.

Ancaman serius yang dihadapi negara bukan tanpa peluang. Potensi sumber daya alam, dengan kekayaan keanekaragaman hayati, tanah yang subur, air melimpah,

dan sumber daya manusia besar, seharusnya bukan dihadapi dengan memperbesar impor bahan makanan. Kebijakan yang berorientasi kerakyatan, mendorong produksi, melindungi pangan lokal, memperkecil ketergantungan produk impor seharusnya menjadi keniscayaan.

Di sini media massa memainkan peran penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat maupun menjadi penghubung dengan pemerintah. Keberadaannya diperlukan untuk memberikan pemahaman, terkait ancaman yang dihadapi, peluang yang terbuka lebar, potensi yang dimiliki hingga jalan keluar bagi yang tengah dilanda kebingungan menghadapi problem-problem baru seperti di atas. Media tidak hanya memberikan penyadaran, pendidikan, namun juga menjadi pembuka ruang interaksi antar sesama yang lebih luas, hingga kontrol sosial bagi masyarakat dan pemerintah.

Hal ini lah yang melatar belakangi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan OXFAM mengadakan “Penghargaan untuk Liputan Media Terbaik tentang Isu Keadilan Pangan”. Penghargaan ini diharapkan menjadi bentuk apresiasi kepada jurnalis yang telah peduli dan membuat liputan isu Keadilan Pangan. Di tengah-tengah industri media massa yang berlomba menyajikan liputan yang hanya mengejar rating, sebagian jurnalis meliput tema berbeda, hingga isu keadilan pangan mendapatkan tempat.

Sejak diumumkan ke masyarakat, khususnya jurnalis, AJI telah menerima 147 karya, yang dibagi dalam 2 kategori. Untuk kategori cetak-online 95 karya dan kategori foto sebanyak 52 karya. Karya ini dijaring sejak Oktober 2014 hingga awal Januari 2015. Dari segi tema, kami menilai karya jurnalistik yang masuk sudah cukup beragam.

Pada akhirnya, saya berharap liputan media dapat menyebarkan informasi lebih luas lagi mengenai isu keadilan pangan serta melahirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Isu pangan tidak hanya milik rakyat miskin yang memiliki akses terbatas, namun menjadi kesadaran semua pihak, masyarakat pada umumnya hingga pemerintah.

Tak lupa AJI mengucapkan terimakasih kepada OXFAM atas kerjasama dan dukungan penuh dalam penyelenggaraan penghargaan ini. Demikian pula kepada para pihak yang telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua Dewan Juri yang telah memberikan waktu dan kompetensinya untuk memilah, menilai, dan menentukan pemenang. Juga kepada seluruh jurnalis di Indonesia yang peduli terhadap nasib masa depan bangsa.

**– Suwarjono**  
Ketua Umum AJI



# KATA PENGANTAR OXFAM

*“A nation of sheep will beget a government of wolves.”*

— Edward R. Murrow

**M**edia massa adalah pemangku kepentingan kunci dalam kerja kampanye dan advokasi Oxfam di Indonesia. Seperti halnya telah dikupas dalam banyak literatur, media massa bisa berperan dalam menyebarkan informasi kepada publik (information role), membangun opini publik dan mempengaruhi agenda kebijakan (leadership role), serta memantau dan mendorong akuntabilitas kebijakan (watchdog role). Secara ringkas, media massa menjadi penting karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga Negara mampu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan guna memampukan mereka untuk menyatakan sikap dan pendapat atas perihal yang menjadi kepentingan mereka.

Dalam konteks kampanye keadilan pangan di bawah program GROW yang telah dimulai sejak tahun 2012, Oxfam melalui kemitraan dengan AJI Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan peran media massa untuk mendukung tujuan program dalam mewujudkan perubahan kebijakan serta menguatkan dukungan bagi keberlanjutan sistem produksi pangan lokal dan penghormatan bagi hak-hak produsen pangan skala kecil yang menjadi tulang punggung produksi pangan

kita. Melalui program GROW, Oxfam tidak hanya merengkuh keterlibatan media massa sebagai institusi namun juga membangun kapasitas para jurnalis untuk memahami dan mewartakan isu keadilan pangan dengan lebih baik dan secara lebih dalam.

Penganugerahan GROW Award tahun 2015 dan penerbitan buku ini merupakan bentuk upaya Oxfam untuk mengapresiasi dukungan dan keterlibatan media massa dan para jurnalis dalam mendorong isu keadilan pangan dalam ranah wacana publik di Indonesia. Inisiatif ini, selain menjadi penanda komitmen Oxfam untuk berjemba tangan dengan media massa, juga diharapkan bisa memberikan insentif bagi para jurnalis di tingkat nasional maupun lokal untuk terus mewartakan dan membangun kesadaran publik atas pentingnya isu keadilan pangan di Indonesia.

**– Darmawan Triwibowo**

Koordinator Nasional Advokasi dan Kampanye,  
OXFAM di Indonesia

# KATA PENGANTAR DEWAN JURI KATEGORI CETAK-ONLINE

**K**etika media mengutamakan melayani 20-30% warga di puncak piramida penduduk - mereka yang memiliki kekuatan membeli - maka akan sulit mendapatkan liputan mengenai keadilan pangan atau kedaulatan pangan. Liputan terkait pangan lebih terfokus pada makanan seperti di mana restoran atau tempat makan terkenal dan terenak atau mengenai makanan sehat dan berbagai pola makan agar tidak kelebihan berat badan.

Liputan media bukan mengenai 40% warga di dasar piramida penduduk yang terpaksa hanya mampu makan sekali dalam sehari, yang tidak pernah memikirkan makanan sehat atau buruh tani yang tidak memiliki lahan atau petani yang terpaksa menjual gabah untuk membeli beras murah.

Tidak adil ketika produksi pangan berlebihan dan sebagian warga mengeluarkan uang untuk makanan sehat tetapi masih banyak warga yang terpaksa hanya makan sekali dalam sehari atau warga di Rimbang Baling, Riau, dan Samosir kesulitan mendapatkan makanan karena tidak bisa bertani.

Tidak adil ketika pemerintah mencanangkan swasembada pangan dengan mengadopsi sistem produksi pangan (baca: padi) modern dengan lahan pertanian maha luas (ekstensifikasi), benih bersertifikat, pupuk kimia dan pestisida (ekstensifikasi)

dari perusahaan multinasional, malah mengabaikan petani organik kreatif penghasil benih, pupuk dan pestisida sendiri, atau tanpa upaya mengembangkan jenis pangan asli, menutup akses petani pada sarana produksi pangan, yang ujungnya menambah jumlah petani gurem. Tidak adil ketika sistem sertifikasi benih tidak memungkinkan petani kreatif mendapatkan sertifikat untuk benih unggul yang mereka hasilkan.

Tidak adil ketika pemerintah - yang didukung para penyedot rente ekonomi - terjebak teori ekonomi “suplai banyak, harga turun” mengimpor daging sapi malah menaikkan harga daging sapi di pasar-pasar, mengimpor beras sementara harga beras petani anjlok, mengimpor gula yang memukul petani tebu.

Tidak adil ketika upaya petani Pulau Buru mempertahankan budi daya hotong, sebagian kecil warga Papua yang masih setia mengonsumsi sagu, petani kreatif yang masih menanam benih padi lokal tidak masuk dalam sistem produksi pangan.

Setelah membaca, mencoba menangkap esensi, dan menilai 95 tulisan - judul tunggal maupun serial - para juri menyimpulkan:

- Sebagian besar tulisan tidak menyajikan kondisi ketidakadilan dalam sistem produksi pangan
- Jurnalis masih perlu memahami keadilan pangan agar bisa mendorong sistem produksi pangan yang lebih berkelanjutan dan menyejahterakan petani

Dari sudut pandang jurnalistik, para juri menilai:

- Sebagian tulisan serial cenderung berpanjang-panjang yang akibatnya banyak pengulangan tidak perlu padahal sebagian tergolong liputan menyelidik (investigatif)

- Masih minim liputan lapangan
- Sebagian besar tulisan tidak deskriptif terutama terbitan media lokal
- Ada kecenderungan terlalu banyak kutipan langsung yang tidak menggambarkan karakter nara sumber atau banyak kutipan langsung yang bukan suara asli nara sumber
- Masih banyak kesalahan tata bahasa

Setelah menimbang, juri memilih 10 judul yang bisa memberikan gambaran kondisi sistem produksi pangan di Indonesia yang jauh dari pertimbangan keadilan untuk diterbitkan dalam satu buku.

Media memiliki kekuatan mendorong pelaksanaan sistem produksi pangan yang berkeadilan jika para jurnalis betul-betul memahami persoalan keadilan pangan. Organisasi nirlaba seperti Oxfam harus lebih strategis bagaimana mendorong media lebih banyak meliput persoalan keadilan pangan.

Organisasi profesi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bertanggung jawab meningkatkan pemahaman para anggotanya untuk berbagai isu tidak umum seperti isu keadilan pangan.

Mudah-mudahan ke-10 tulisan ini bisa menginspirasi para pembaca – terutama jurnalis dan editor – lebih peduli untuk mendorong pemerintah agar membangun sistem produksi pangan yang lebih adil bagi semua warganegara Indonesia.

—Harry Surjadi

**P**angan meski merupakan hak asasi manusia, namun keberadaannya tidak terlalu dianggap penting. Di media, sangat sedikit liputan yang lengkap tentang pangan. Apalagi yang berfokus pada penghasil pangannya dan cara mereka berjuang menghasilkannya dan terus berusaha menjaga alamnya. Termasuk di dalamnya cara mereka menggapai kesejahteraan dengan segala peluh mereka. Sementara *booming* kuliner dan gaya hidup sehat pun belum menyentuh dan terhubung dengan pangan karya mereka.

Sudah saatnya isu pangan ditampilkan secara lengkap lewat media, sehingga masyarakat bisa mempunyai pengetahuan yang lengkap. Dan pada akhirnya bisa tumbuh keberpihakan pada produksi lokal dari penghasil pangan kita sendiri. Di situlah fondasi pangan yang berkeadilan mulai terbangun. Semoga

—Tejo Wahyu Jatmiko

**T**ujuan sebuah penghargaan bukan hanya merangsang jurnalis menghasilkan liputan bermutu, namun juga membiasakan mereka peka terhadap isu-isu penting yang seringkali luput dari pengamatan. Oxfam dan AJI ingin mengajak jurnalis peduli terhadap persoalan keadilan dan ketahanan pangan.

—Renjani Puspo Sari

# KATA PENGANTAR DEWAN JURI KATEGORI FOTO

Pemahaman yang umum ada tentang fotografi adalah, dia menyampaikan realita. Yang kurang dipahami secara umum adalah, seberapa jauh realita bisa digambarkan oleh selebar foto ?

Demikian pula jargon ini: selebar foto setara seribu kata. Benarkah ?

Kenyataan menunjukkan tidaklah demikian karena kedua jargon di atas, ---yaitu foto adalah wakil realita dan foto mewakili seribu kata---, hanya benar manakala fotonya dibuat dan disajikan dengan benar pula. Dalam dunia jurnalistik, tantangan tentang penyampaian sebuah foto adalah hal utama, bukan soal teknis lagi.

Selain itu, kadang realita-realita visual yang sudah ada (foto-foto) itu harus dikumpulkan lagi agar menjadi "realita baru". Itulah yang terjadi dengan lomba foto keadilan pangan ini.

Selama ini foto-foto tentang realita pangan kita, tentang makin berkurangnya lahan pertanian, tentang tantangan para petani dalam berproduksi, dan berbagai hal tentang pangan yang lain hanya muncul bergantian dan tersebar di berbagai media. Kekuatan foto-foto itu satu persatu tentu tak akan bisa menyamai kekuatan saat mereka ditampilkan sekaligus dan seketika.

Lomba foto keadilan pangan 2015 ini sungguh menyentak

kesadaran kita bahwa Indonesia kurang tangguh dalam hal swa sembada ini. Berbagai hal telah menggerogoti secara terasa mau pun tidak. Maka, sebuah foto dari topik ekonomi, yaitu perubahan area sawah menjadi sebuah toko swalayan mini, sungguh telah bertransformasi menjadi foto tentang pangan. Dari masalah ekonomi semata, ternyata bisa menjadi masalah pangan manakala cara berpikir dan melihat kita diubah.

Secara umum lomba foto tentang keadilan pangan ini sungguh dilakukan di saat yang tepat. Foto-foto yang masuk pun telah menunjukkan bahwa kesadaran ini sebenarnya telah ada pada kita semua.

– Arbain Rambey

Lahan pertanian yang tergusur industrialisasi, pembangunan infrastruktur masih menjadi isu kuat dalam tema Isu Keadilan Pangan. Begitu juga masalah serbuan produk pangan import dan kearifan lokal masyarakat pedesaan. Permasalahan yang muncul di petani, yang hampir semuanya jauh dari ibukota, direkam dengan baik oleh pewarta foto. Pewarta foto di luar Jakarta lebih sensitif menangkap isu ini, karena masalah lahan dan produk pertanian lebih terasa langsung di daerah.

– Rully Kesuma

**M**emahami isu dan menggambarkannya secara visual merupakan tantangan bagi setiap pewarta foto. Termasuk mereka yang mengikuti lomba foto bertema Keadilan Pangan ini. Mayoritas peserta lomba memahami tema Keadilan Pangan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian. Beberapa foto menarik secara visual, namun kurang mencerminkan isu atau tema yang ditentukan. Dalam proses penjurian kami berusaha menemukan foto-foto yang memiliki bobot isu dan visual yang berimbang.

—Ng Swan Ti



# KATEGORI CETAK – ONLINE

## NOMINASI :

<b>Sepotong Kisah dari Papua : Peladang Ulung dari Lereng Gunung, Kemakmuran Sagu, Mengubah Arah Kebijakan Pangan</b> Penulis: Budi Suwarna, Aryo Wisanggeni, Josie Susilo, Wisnu Widianoro.....	19
<b>Hotong, Pangan Asli Pulau Buru</b> Penulis: Antonius Ponco Anggoro, Gregorius M Finesso, M Clara Wresti.....	43
<b>Balik ke Beras Lokal, Sehat dan Berdaulat</b> Penulis: Shinta Maharani.....	49
<b>Petani Benih Berdaulat di Lahan Sendiri; Petani Benih Berdaulat di Lahan Sendiri (2)</b> Penulis: Irvan Imamsyah.....	57
<b>Belajar ke Lumbung Pangan Nol Pestisida</b> Penulis: Shinta Maharani.....	73
<b>Sulit Berahi Ancam Swasembada</b> Penulis: Akbar Tri Kurniawan.....	79
<b>Balada Daging Sapi Impor ; Balada Daging Sapi Impor (bagian 2)</b> Penulis: Dimas Rizky Chrisnanda.....	87
<b>Gula Siluman Menjelang Royalan</b> Penulis: Akbar Tri Kurniawan.....	95
<b>Ketika Petani Samosir Kesulitan Bertani</b> Penulis: Mohammad Hilmi Faiq.....	105
<b>Inflasi Pangan “Negeri di Awan”</b> Penulis: Muhammad Amin.....	111

## PEMENANG TERBAIK:

### **Sepotong Kisah dari Papua: Peladang Ulung dari Lereng Gunung, Kemakmuran Sagu, Mengubah Arah Kebijakan Pangan**

Penulis: Budi Suwarna, Aryo Wisanggeni, Josie Susilo, Wisnu Widianoro

## PEMENANG BERPOTENSI:

### **Inflasi Pangan “Negeri di Awan”**

Penulis: Muhammad Amin



**Budi Suwarna**

Pria kelahiran Tasikmalaya ini sudah makan asam garam dalam karirnya di dunia jurnalistik. Pada tahun 1996 sudah mengawali karir jurnalisnya, dimulai dari reporter Radio Mara FM Bandung, lalu bekerja di Majalah Tajuk dan sejak tahun 2002 sampai sekarang bergabung di Harian Kompas. Budi Suwarna selama di Kompas sudah bertugas di Desk Nusantara, Desk Internasional, Desk Kompas Minggu, dan Desk Olahraga. Kepiawaiannya dalam mengolah kata, sesuai dengan latar belakang pendidikannya, yaitu S1 Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran.



**Aryo Wisanggeni G.**

Bekerja di harian Kompas sejak 2003. Pernah meliput di Jawa Timur (2003-2005), Papua (2005-2007), Sulawesi Selatan (2007-2010). Sejak 2010 bekerja di Jakarta.



**Josie Susilo**

Sebagai jurnalis di Harian Kompas, Josie Susilo pernah berkarya di Papua, Medan, Lampung dan Batam. Berasal dari Bojonegoro, 26 Februari 1973, Josie saat ini bertugas di desk internasional berkedudukan di Jakarta.



**Demitrius Wisnu Widiatoro**

Setelah lulus kuliah di Jurusan Sosiologi, FISIP UNS tahun 2003, Demitrius Wisnu Widiatoro langsung diterima bekerja di Harian Kompas di Surabaya. Perkembangan karir berikutnya, Wisnu kemudian bertugas di Bandung dan tak lama kemudian berpindah ke Jakarta hingga saat ini bertugas di desk Politik Hukum dengan tugas meliput kegiatan Presiden.

# SEPOTONG KISAH DARI PAPUA

Oleh: **BUDI SUWARNA, ARYO WISANGGENI, JOSIE SUSILO,  
dan WISNU WIDIANTORO**

dimuat dalam Kompas pada 22 Desember 2013

*Tanah Papua, wilayah paling luas di negeri ini, memiliki banyak kisah tentang makanan, alam, dan manusianya. Tak ada kisah yang akan utuh menuturkan tradisi bersantap Papua. Ini cerita tentang makin pudarnya penghormatan terhadap keberagaman pangan di Nusantara dan kisah tentang surutnya kemandirian pangan masyarakat Papua.*

**T**ak ada api yang tersisa, tak ada semerbak aroma rempah yang menggantung di udara. Yang ada hanya asap tipis mengepul dari tumpukan batu di samping *hunila* atau *honai* panjang dapur keluarga Iriana Wetipo. Ketika memasak belum lagi dimulai, kayu yang membakar tumpukan batu itu tinggal menyisakan abu. Hangat menyusup di antara dinginnya angin sore Lembah Baliem di Kampung Hepuba, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Minggu (8/12).

Maria Lokobal, mertua Iriana, mengambil sebuah tongkat yang ujungnya terbelah untuk menjepit dan memindahkan batu-batu panas ke dalam sebuah liang bulat. Ia menyusun batu-batu panas itu melapisi dinding liang sedalam 70-an

sentimeter. "Inilah bakar batu, memasak dengan batu yang dibakar sampai panas," tutur Maria.

Magda Lokobal, adik Maria, mengambil peran lain. Ia menaruh sepelukan daun lokop, sisika, jeleka, dan daun dari tanaman serupa pohon kapas untuk melapisi batu-batu panas. Maria dan Iriani menyusul Magda dengan memasukkan aneka jenis ubi. Orang Hepuba menyebutnya *hupuru*, orang Wamena menamainya *hipere*. Di daerah barat Papua, barang yang sama disebut *erom* atau *mbik*.

Setelah *hupuru*, giliran berbonggol-bonggol jagung ditanam di sela-sela ubi. Magda kembali menimbun liang itu dengan sepelukan lain daun lokop. Timbunan itu dilapisi lagi daun pisang dan setumpuk daun lokop. Maria menambahkan garam dan menuangkan minyak goreng nabati hingga tumpukan itu nyaris kuyup.

Tidak berhenti di situ, Magda dan Iriana kembali melapisi tumpukan itu dengan daun pisang lebar dan daun lainnya. Agar tak ada uap panas yang keluar dari liang, mereka melapisi lagi timbunan itu dengan plastik bening dan kain-kain usang. Begitulah, ada berlapis-lapis bahan yang dimasukkan untuk mengunci suhu panas batu tetap berada di dalam liang. "Kita tinggal menunggu, satu jam saja *hupuru* akan matang sempurna. Daun-daun itu tidak sekadar melapisi batu agar ubi jalar tidak gosong, tetapi juga memberi rasa," kata Maria tersenyum.

Ketiga "koki" bakar batu itu segera menghilang ke dalam *hunila* Iriana, meninggalkan lubang bakar batunya yang kini menjadi gundukan kecil dengan asap tipis mengudara. Suami Maria, Ferry Asso, tertawa melihat wajah tetamunya digantungi aneka pertanyaan. "Kita akan menyantap *hupuru* yang lezat. Bakar batu selalu menawarkan sajian yang lebih

lezat dari sepiring nasi," katanya.

Asso menunjuk ke pagar panjang mendaki bukit yang memagari tiga *hunila* dan sebuah *honai* (rumah tradisional berbentuk bulat) di kaki bukit di Hepuba itu. "Seluruh kompleks rumah-rumah ini kami sebut *silimo*. *Hunila* yang paling atas ini menjadi dapur menantu saya, Iriana. Bakar batu di samping *hunila* dimasak untuk santapan keluarga *hunila*-nya. *Hunila* Maria ada di bawah, dan lain hari Maria membuat bakar batu di sana untuk santapan kami."

Pelan tetapi pasti, aroma yang memompa selera kian tercium dari gundukan itu. Setelah satu jam berlalu, Iriana, Maria, dan Magda membongkar kembali liang bakar batunya, membebaskan panas yang terperangkap timbunan dedaunan, kain tua, dan plastik. Segenap orang di *silimo* beranjak mendaki tanjakan kecil menuju *hunila* Iriana, merubung Maria yang menggali puluhan ubi jalar bakar. "Ini yang paling enak," ujar Asso mengambil sebuah ubi jalar berkulit ungu yang tampak kering, nyaris serupa ubi jalar mentah.

Begitu ubi di genggamannya merekah, uap yang lebih pekat segera menebar harum. Pada gigitan pertama, sensasi rasanya begitu berbeda. Ubi itu begitu bersih, polos, namun sungguh pulen dan lembut hingga nyaris melumer di lidah. Rasanya manis seperti madu dengan jejak asap yang menyusup hingga ke pori-pori daging ubi.

Maria menyodorkan sebonggol jagung. Begitu pelepahnya terkelupas, biji jagung yang kering langsung menebar rasa manis. "Rasa manisnya jauh berbeda jika jagung itu kami rebus atau kami kukus," tutur Maria, terbahak.

Asso puas dengan bakar batu Minggu sore itu. "Ini bakar batu yang baik, semua sajiannya matang sempurna," tuturnya.

Dia menjelaskan, bakar batu untuk santapan harian dengan

bakar batu untuk ritual sangat berbeda. Untuk keperluan ritual, bakar batu harus digelar di halaman *silimo* Otilu. Ia menunjuk sebuah halaman yang diapit dua *hunila* dan sebuah *honai* perang di tengahnya. Aturan bakar batunya pun lebih ketat. Liang bakar batu biasanya bergaris tengah dua meteran yang cukup untuk menampung setumpuk ubi dan dua ekor babi. "Hanya daun lokop dan lukata yang boleh dipakai untuk melapisi batu panasnya. Selain itu, hasilnya harus dinikmati segenap keluarga yang tinggal di *silimo*," tutur Asso.

Begitulah, bakar batu di halaman *silimo* bukan sekadar aktivitas memasak, melainkan bagian dari ritus. Apa yang keluar dari liang batu bakar adalah isyarat atas doa dan harapan yang mengiringi upacara adat. Jika semua bahan termasak sempurna, itu pertanda baik. Jika ada bagian yang mentah, itu berarti ada sesuatu yang salah. "Kita harus mencari tahu. Pasti ada saja sesuatu yang salah," kata Asso.

Sebagai medium berkomunikasi dengan roh leluhur, ritual bakar batu diyakini harus selalu ada dalam beragam upacara menyangkut laku hidup manusia suku Hubula di Lembah Baliem. Bakar batu juga menjadi tradisi pokok beratus ribu anak adat dari suku-suku lain di kawasan pegunungan tengah Papua yang membentang mulai Kabupaten Paniai di barat hingga Kabupaten Pegunungan Bintang di ujung timur di perbatasan Indonesia-Papua Niugini.

"Tak ada bakar batu tanpa *hupuru* dan babi. Tanpa keduanya, kami tak bisa menjalani ritual menjadi manusia dewasa, menikah, ataupun membuka kebun yang subur. Jika seperti itu, kami bukan lagi anak adat Hubula," tegas Asso.

# PELADANG ULUNG DARI LERENG GUNUNG

**M**anusia diduga telah mendiami lembah dataran tinggi Nugini sekitar 30.000 tahun (*Ekologi Papua*, Sri Nurani Kartikasari et al, 2012). Pulau Nugini seluas 786.000 kilometer persegi adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland dengan kondisi lingkungan yang mendekati kondisi ekologis Australia. Sejak ratusan tahun silam, kawasan pegunungan tengah Nugini menjadi kawasan berpenduduk terbanyak. Mereka hidup ditopang kepiawaiian bertani.

Matahari nyaris sebulan-ubun, tetapi Tina Matuan belum selesai dengan pekerjaannya. Ia berjongkok. Tangan kirinya menjambak setiap rumput gulma di gundukan tanah, menyibak daun ubi jalar yang jarang-jarang. Tangan kanannya menancapkan tongkat kecil untuk mencongkeli gulma dari ladang tumpang sari ubi jalar, bayam, dan jagungnya.

Tiap kali menemukan dedaunan ubi jalar yang merimbun, tongkatnya mencongkel tanah untuk mengintip ukuran ubi jalarnya. Ia menemukan ubi jalar seukuran kepalan tangan. Dicabutnya ubi itu kemudian dilemparkan ke sudut ladang, tempat puluhan ubi jalar lain terserak.

"Kami memanen hipere secukupnya untuk makan hari ini. Besok kami bisa ambil lagi," tutur Matuan sambil terus menyisir ladang di kaki bukit landai di Muai, Distrik Hubikosi,

Kabupaten Jayawijaya. "Pagi makan hipere, sore makan hipere," tuturnya. "Makan beras...? Ya, kalau punya uang..." Matuan terkekeh. Ladang ubi jalar, pisang, jagung, dan bayam terserak di tiap sudut Kabupaten Jayawijaya. Tak hanya di tanah datar seperti ladang Matuan, guludan-guludan ladang sambung menyambung seperti kain perca yang menyelimuti bentang alam lereng dan lembah di Jayawijaya. Antropolog dan Ketua Lembaga Riset Papua Johszua Robert Mansoben menyebut peladang seperti Matuan adalah ahli waris tradisi berladang di kawasan pegunungan tengah Papua. "Hipere atau hupuru itu menjadi tanaman terpenting bagi para peladang di Papua. Gara-gara bertanam hipere, peladang talas yang berpindah-pindah menjadi petani kebun hipere yang menetap," kata Mansoben.

Tanah Papua – sebutan bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat – memiliki beratus-ratus suku dengan 269 bahasa yang berbeda. Suku-suku itu hidup di wilayah seluas 422.000 kilometer yang terdiri dari kepulauan, pesisir, tanah datar, dan pegunungan. Populasi penduduk di pegunungan lebih besar. Dan, sejak lama kehidupan mereka ditopang ladang-ladang ubi jalar yang entah kapan masuk ke Papua dari habitat pertamanya di Benua Amerika. Faktanya, kini ada lebih dari 100 varietas ubi jalar, dengan beragam warna, ukuran, dan rasa. Lembah Baliem memang teristimewa. Dibandingkan daerah pesisir Papua yang panas, iklimnya lebih lembab dan lebih sering diterpa hujan deras. Di Baliem, suhu begitu sejuk, rata-rata hanya 15,2 derajat celsius dengan kelembaban berkisar 78 persen. Mungkin faktor alam yang melenakan itu membuat daerah itu menjadi pilihan tempat tinggal banyak orang.

Populasi penduduk yang besar membuat kebutuhan pangan terus meningkat. Hal itu sekaligus merangsang

munculnya inovasi teknologi pertanian tradisional dan menuntun evolusi pertanian menjadi kian canggih. Sebagaimana para peladang menetap di kawasan pegunungan tengah lainnya, para peladang di Lembah Baliem piawai menaklukkan tiap jengkal lereng yang mendominasi 75 persen bentang alam Jayawijaya. Suku Yali di bagian timur Lembah Baliem, misalnya, memiliki lima teknik menanam hipere, bergantung pada kemiringan tanah ladangnya. Petani di lembah ini juga selalu menumpangsarikan ubi jalar, ubi kayu (*Manihot esculenta*), uwi (*Dioscorea* sp), dan keladi/talas (*Colocasia esculenta*) di satu ladang. Tanaman seperti pisang (*Musa* sp), buah merah (*Pandanus conoideus*), pandan kacang (*Pandanus julianettii*), dan beberapa tanaman sayuran juga selalu ada di ladang guludan.

Budidaya dengan cara ladang guludan (membuat gundukan tanah memanjang demi mempertahankan suhu dan kelembaban mikro tanah) telah ada sejak 7.000 sampai 6.400 tahun lalu. Teknik itu kian maju oleh teknologi pengairan dan drainase yang tumbuh sejak 4.400 sampai 4.000 tahun lalu. Ladang-ladang guludan itu sekaligus menyangga pakan ternak babi—komoditas tradisional terpenting karena menjadi mas kawin dan hewan persembahan yang harus ada di setiap acara bakar batu. Karena itu, mereka juga menjelma menjadi peternak babi yang andal. Di samping itu, mereka berburu dan meramu. Hasilnya buruan mereka olah dengan teknik memasak bakar batu. "Mereka tidak mengenal periuk atau belanga sehingga bakar batu menjadi satu-satunya cara memasak," kata Mansoben.

Masyarakat di pesisir juga bercocok tanam ubi jalar dan aneka tanaman, seperti keladi/talas, ubi kayu, ataupun uwi. Namun, hasil pertanian di pesisir Papua tidak seintensif peladangan di pegunungan tengah. Alam mengonversi

kekurangan hasil ladang orang pesisir dengan menyediakan sagu yang melimpah. Setiap kampung atau marga di pesisir dan dataran rendah lazimnya memiliki hutan ulayat penuh dengan pohon sagu nan rapat. Orang pesisir biasa menyebut hutan sagu sebagai "dusun sagu.

"Belum lagi binatang buruan, ikan sungai, ikan danau, ataupun ikan laut yang melimpah. Masyarakat adat di pesisir kaya bahan makanan sehingga tidak ada desakan untuk melakukan inovasi teknologi pertanian seperti yang dialami masyarakat adat di pegunungan tengah," kata Mansoben.

# KEMAKMURAN SAGU

**A**yunan alat pangkur itu berayun secepat tarikan dua lengan kuat. Dalam satu tarikan napas, pangkur itu mengacung tinggi. Ketika ia menghela napas, seluruh badan bagian atas Agustina berayun cepat menghujamkan pangkurnya ke daging batang pohon amos atau sagu berduri (*Metroxylon rumphii*). Di punggung Agustina, Lobeka (3), putrinya, menempel rapat dalam gendongan. Sudah dua hari Lobeka menjadi bagian dari ribuan ayunan kuat tubuh ibunya. Dan, ia tidak jera.

Daging amos berwarna krem hancur terserak di antara kedua kaki Agustina. Yang tersisa tinggal semeteran batang sagu sepelukan orang dewasa itu. Saat daging sagu menggunduk, Agustina memindahkannya ke dalam sebuah tas berbahan karung beras ukuran 10 kilogram. Begitu tas itu penuh, Agustina menyungginya menuju pinggir Sungai Siratz di Distrik Kaibar, Asmat, Papua. Ketika Agustina datang, Ruben—suaminya—belum selesai menapis sari pati sagu yang dipangkur Agustina sebelumnya. Dalam sebuntalan kain yang ada di pangkal pelepah sagu, tangan Ruben meremas kuat-kuat sabut daging sagu. Perasan putih mengalir pelepah sagu menuju pelepah lain yang menjadi "kolam pengendapan" sagu.

Kegiatan menangkur sagu telah dilakukan suami istri itu selama dua hari terakhir. Keduanya pergi meninggalkan Kampung Pinerbis di Distrik Kaibar dengan membawa dua anak balitanya, Lokeba dan Yosekin (1). Setelah mendayung

perahu berkilo-kilometer, mereka tiba di hutan sagu ulayat sukunya. "Kami akan memangkur sagu hingga cukup persediaan selama dua bulan ke depan. Setelah itu barulah kami pulang ke Pinerbis," kata Ruben.

Itu berarti dua-tiga pekan Ruben, Agustina, Lobeka, dan Yoseakin bakal tidur dalam bivak berdinding dan beratap daun sagu. Musim pangkur sagu juga diiringi perburuan singkat aneka satwa dan ikan di hutan dataran rendah yang lebat dan basah, tempat berbagai burung, reptil, dan mamalia, seperti tikus hutan, posum, kuskus, ataupun kelelawar, bisa ditemukan. Dari sagu yang dipangkur dengan segenap keringat dan entakan napas itulah, lempeng lempeng sagu bakar dihasilkan.

Parutan endapan pati sagu yang menggumpal keras melumer perlahan, menebar bau terbakar yang khas. Aroma gosong itu mengimbuhi rasa tawar sagu bakar. Sagu bakar selalu menyodorkan sensasi rasa mengunyah karet kenyal yang hangat dan berbulir-bulir kasar. Setiap otot geraham serasa bekerja ekstra melumat bola dan lempeng sagu. Sensasi itu bisa ditemukan di hampir setiap tempat di Asmat dan pesisir selatan Papua lainnya.

Ratusan kilometer dari bivak Ruben, di dapur Martina Bateh yang ada di tepian dusun sagu, Kampung Workwana, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sagu yang tersuguhkan sama sekali berbeda. Tangan Bateh meremas kuat gumpalan pati sagu dalam baskom, lantas melarutkannya dengan air bercampur perasan jeruk nipis. Setelah ditapis, air seputih susu itu dituangi air mendidih. Dua tongkat seukuran sumpit di tangan Bateh berputar cepat mengaduk adonan pati sagu yang segera mengental menjadi jenang. "Inilah papeda," ujar Bateh sambil mengangkat baskom itu ke meja dapurnya.

Dari meja itu tercium aroma lezat sepanci sajian ikan kuah

kuning yang menjadi teman menyantap papeda. Sup ikan berkuah kuning itu lebih dahulu dituangkan ke piring kosong, mengalasi papeda agar tak lengket di piring. Beramai-ramai kami menyantapnya di kebun di belakang dapur Bateh. Bateh dan para kerabatnya tertawa melihat kami kelabakan menggulung gumpalan sagu dan menumpahkannya ke atas piring. Segala kepanikan itu langsung terbayar ketika sesuap sagu yang basah kuyup oleh kuah kuning menggelontor ke tenggorokan sambil meninggalkan jejak pedas cabai dan harum serai.

Dari antropolog Mansoben, barulah kami tahu betapa istimewanya sajian papeda dari dapur Bateh. "Masyarakat adat di Sentani dan Arso mengenal belanga yang dibuat dari tanah liat yang mudah didapati di kawasan Danau Sentani. Belanga membuat mereka piawai mengolah sagu menjadi papeda atau jenang sagu yang membutuhkan air mendidih.

Berbeda dengan di Asmat, karena tak mengenal belanga, mereka menyantap sagu lempeng dan sagu bola yang dibakar dan diparut," kata Mansoben. Serupa dengan bakar batu, sagu bakar dan papeda juga terkait dengan kisah leluhur dan alam roh. Setiap manusia adat Papua pastilah menghormati sagu lebih daripada sekadar santapan. Banyak suku di Papua mengenal mitologi sagu yang dikisahkan sebagai penjelmaan manusia dengan beragam kisah dan nama. Manusia mengorbankan dirinya demi memberi makan anak-keturunannya. "Sagu adalah inti dari berbagai ritual masyarakat adat di pesisir dan dataran rendah Papua," kata Mansoben.

Dalam budaya patriarkat masyarakat adat Asmat, misalnya, setiap tahun digelar pesta ulat sagu. Pesta ulat sagu menjadi satu-satunya hari ketika perempuan Asmat boleh memasuki jew atau rumah komunal tempat setiap lelaki dewasa bertempat tinggal di kampong tradisional Asmat. Para perempuan berpesta dilayani para suami yang memasak untuk

mereka. Di hadapan beratus orang di dalam jew, setiap istri berkesempatan mengutarakan segenap isi hati, kemarahan, kekecewaan, juga cercaan. Sebaliknya, setiap suami harus mendengar dan meminta maaf kepada istrinya. Pesta yang kerap diakhiri isak tangis haru.

“Ritual ulat sagu adalah ritus memuliakan perempuan Asmat, dan pesta ulat sagu selalu menebar energi baru bagi tiap kampung Asmat untuk melanjutkan kehidupan mereka sebagai manusia. Ada banyak ritus suku lain yang juga menjadikan sagu sebagai persembahan utama,” kata Mansoben.

Karena itulah, generasi tua mulai gusar melihat cucu-cucu mereka tak lagi mau menyantap sagu dan lebih memilih nasi. “Anak-anak belasan tahun tidak mau lagi makan sagu. Mereka tidak tahu cara membuat sagu. Hanya orang berumurlah yang masih menokok sagu dan menyantapnya. Rasanya sagu bakal segera hilang dari sajian di meja makan kami,” tutur Bateh dengan nada sedih. Di pegunungan tengah, nasi juga mulai menggeser ubi, keladi, dan jagung. Tengoklah suguhan pesta kecil menyambut Natal di *hunila* keluarga Wes Togotli di Bolakme, Jayawijaya. Menunya adalah seketel besar nasi, sewajan rica babi, sepanci besar mi instan dengan beberapa helai kubis, dan sepiring kecil ikan sarden.

“Silakan, mari kita bersantap,” ajak Togotli kepada para tamunya. Kami pun segera menyerbu suguhan itu. Keriangan suasana santap siang di *hunila* Wes Togotli adalah keriangannya yang sama seperti yang kami temukan di *hunila* Iriana di Hepuba, Distrik Asolokobal. Yang berbeda hanya pada masakannya. Di *hunila* Iriani, kami menemukan sajian otentik masyarakat pegunungan Papua, yakni ubi bakar batu. Sementara itu, di *hunila* Wes Tigotli kami menyantap masakan yang hampir semua bahannya didatangkan dari luar. Ini keseharian santapan di *honai*, santapan yang semua bahannya

pabrikasi dari luar Wamena,” tutur Sekretaris Distrik Bolakme Cyrillus Willem seperti membaca pikiran kami.

Mau tahu berapa harga sebungkus mi instan di Pasar Bolakme yang berjarak 500 meter dari *hunila* Wes Togotli? Rp 10.000! Mau tahu harga segenggam beras yang hanya akan cukup untuk memasak sepiring nasi? Rp 10.000! Harga-harga ajaib itu muncul lantaran semua “makanan asing” itu harus diangkut dari Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, dengan mobil bergandan ganda ke distrik-distrik nan jauh, termasuk Bolakme. Kacaunya, harga barang di Wamena sudah jauh dari normal. Intiplah harga barang di UD Usaha Baru, salah satu toko kelontong di Wamena. “Beras Rp 19.000 per kilogram, gula Rp 20.000 per kilogram, kopi Rp 15.000 per 165 gram, minyak goreng kemasan Rp 25.000 per liter. Sekali berbelanja, uang belanja tidak mungkin kurang dari Rp 100.000. Semua komoditas selalu diburu warga. Stok 2,5 ton beras pasti tandas dalam dua-tiga hari,” kata Udin, penjaga toko kelontong itu. Udin punya penjelasan sederhana soal harga serba mahal itu. “Semua barang memang mahal karena didatangkan dari Jayapura dengan pesawat. Harga satu kilogram garam di Jayapura Rp 3.500, diangkut dengan biaya Rp 8.000 per kilogram. Silakan dijumlah sendiri harga jualnya, lebih mahal ongkos angkut ketimbang nilai barangnya. Itu belum menghitung kelangkaan yang kerap terjadi karena kami gagal mengangkut barang jualan dari Jayapura ke Wamena. Sudah dua pekan ini, stok mi instan kami kosong,” keluh Udin, awal Desember lalu.

# KEMANDIRIAN YANG HILANG

**D**engan seluruh kemahalan distribusi barang di Papua, nyatanya orang Papua semakin tergantung kepada beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Berbagai program bantuan uang jadi pemicunya karena memupus etos kerja orang Papua untuk bertani dan beternak. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan tanaman industri, seperti sawit, juga membatat gudang pangan masyarakat adat Papua sehingga lagi-lagi membuat ketergantungan orang Papua akan beras semakin tinggi.

Senin (9/12) siang itu, halaman Kantor Pos Wamena di ibu kota Kabupaten Jayawijaya penuh sesak oleh ratusan

warga yang mengantre pencairan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Para warga antre untuk mengambil bantuan uang cair tahap 1 dan 2 periode 2013 senilai Rp 600.000 per keluarga sasaran.

Awalnya, Pieter Gaspersz yang juga Sekretaris II Satgas BLSM Kantor Area XI Papua Maluku cukup duduk manis di mejanya, mengawasi pencairan uang bantuan dari pemerintah pusat itu. Sepertinya urusan pembagian dana Rp 8 miliar untuk penerima BLSM di Distrik Wamena Kota dan Distrik Asologaima bakal mulus. Namun, tiba-tiba terdengar protes dari kerumunan warga yang mengantre.

"Bantuan itu tidak betul. Kenapa ada warga yang dulu

menerima dan sekarang tidak menerima?" seru salah satu kepala desa yang berdiri di hadapan meja Gaspersz. Di belakang si kepala desa itu, beberapa warga turut meneriaki Gaspersz, sementara puluhan orang lainnya sibuk berdebat soal siapa saja penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang kini tak kebagian jatah BLSM.

Suasana makin gaduh karena setiap orang meneriakkan pendapatnya, saling berebut bicara. Gaspersz memotong perdebatan itu sebelum situasi semakin gaduh dan kacau. "Ini bukan pencairan BLT. Bapak harus ingat, dulu saat pencairan BLT, semua penerimanya memegang kartu bukti penerima BLT. Sekarang ini tidak ada kartu karena ini memang bukan BLT. Ini program BLSM, kartu BLSM semua ada di kami. Kalau ada penerima BLT yang tidak menerima dana BLSM itu karena sasaran BLSM memang berbeda dengan sasaran BLT," ujar Gaspersz, juga dengan setengah berteriak.

Gaspersz menghela napas seperti lemas. "Menjelaskan beda BLT dan BLSM di kota saja sudah susah seperti ini. Padahal, BLSM juga harus dibagikan di puluhan distrik lainnya. Di Jayawijaya, ada 35.330 rumah tangga sasaran BLSM, yang secara total akan menerima dana Rp 21 miliar. Anda bisa bayangkan protes yang akan kami hadapi di titik pencairan lainnya?" Gaspersz bertanya. BLSM hanya satu dari sekian banyak program "bagi-bagi uang" pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua, misalnya, sejak tahun 2007 menggelontorkan dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung atau Respek berupa uang cair Rp 100 juta per kampung. Tiap tahun, anggaran Pemerintah Provinsi Papua untuk program itu tak kurang dari Rp 470 miliar.

Pemerintah pusat dan daerah juga bersama-sama menggelontorkan bantuan langsung masyarakat (BLM). Beginilah kerumitan rumus "bagi-bagi uang" BLM, terinci

menjadi program PNPM Pedesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Pedesaan, dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah. Nilai BLM Papua pada 2013 mencapai Rp. 742,7 miliar. Di Papua Barat, program yang sama menggelontorkan dana Rp. 255 miliar.

Bermanfaat bagi masyarakat? "Sama sekali tidak," kata pegiat hak asasi manusia, Pater John Djonga Pr. "Bantuan uang tunai dan beras miskin menghancurkan etos kerja. Sekitar tahun 1995, Jayawijaya adalah daerah pertanian produktif, yang bahkan mengirimkan banyak hasil bumi ke Jayapura dan Mimika. Semua itu sekarang tinggal cerita," kata Pater John Djonga. Ada begitu banyak bantuan uang dan beras miskin diberikan sehingga waktu orang habis untuk mengantre bantuan.

Orang semakin malas berkebun, apalagi beternak. Semua berpikir pintas. Toh, ada beras bantuan dari pemerintah. "Kalaupun tak ada beras miskin, orang di Wamena akan memakai uang bantuan untuk membeli beras yang harganya Rp 19.000 per kilogram itu. Itu tak memberdayakan orang Jayawijaya, yang pada dasarnya adalah petani dan peternak hebat," ujar Pater John Djonga.

Seluruh kekacauan itu digenapi oleh alih fungsi hutan besar-besaran, hasil utak-atik dan corat-coret di peta yang nyatanya juga menguapkan kemandirian pangan orang asli Papua. Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Keerom adalah satu contoh alih konversi hutan yang menghilangkan dusun sagu dan hutan perburuan masyarakat adat.

Pada tahun 2007, di Arso telah terdapat sekitar 1.500 hektar kebun sawit PT Perkebunan Negara (PTPN) II yang terbengkalai karena telah melewati masa produktif. Tanpa pernah mencari solusi atas lahan sawit mangkrak itu, pada

2008 pemerintah justru menerbitkan izin pembukaan 26.300 hektar hutan di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom

untuk dijadikan kebun sawit. Dari 26.300 hektar hutan yang dijatahkan pemerintah, 18.338 hektar di antaranya

telah dikuasai Rajawali Group melalui anak perusahaannya, PT Tandan Sawita Papua. Awal Desember lalu, Yuliana Langwuyo mengajak kami mengunjungi bekas hutan yang telah bersalin wajah menjadi kebun sawit muda itu.

"Perkebunan kelapa sawit PTPN II dibuka pada 1983. Orang Arso adalah masyarakat adat berburu dan meramu, yang selama 30 tahun gagal beralih menjadi pekerja kebun sawit. Masyarakat adat di Arso Timur juga pemburu dan

peramu, persis orang Arso. Ketika hutan lumbung pangannya hilang, orang Arso Timur pun mengandalkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dulu orang Arso Timur pemilik hutan yang kaya pangan itu. Sekarang mereka hanya menjadi buruh kebun sawit," kata Langwuyo yang juga staf Sekretariat Keadilan,

Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua itu. Kondisi itu serupa dengan situasi masyarakat adat Malind-Anim di Merauke, yang hutannya sedang disulap menjadi kawasan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Lewat MIFEE, lagi-lagi hutan Papua bakal disulap menjadi lahan penanaman padi, tebu, dan kelapa sawit. Hanya di beberapa kampung kecil, seperti di Wendu, kurang lebih satu jam perjalanan dari Merauke, dusun sagu masih bertahan.

Di Distrik Okaba yang termasuk cetak biru MIFEE, warga mencoba menahan laju MIFEE dengan menggelar pesta dan lomba membakar sagu. Berbagai sep sagu muncul dengan aneka cita rasa sagu bakar. Mulai dari wanggilamo, berupa

sagu bakar berisi daging bercampur parutan kelapa, sampai dengan kumabo yang berupa sagu bakar dari adonan parutan kelapa muda serta pisang.

Sekretaris Dewan Adat Wilayah V Ha Anim John Wob mengatakan, percampuran sagu, kelapa, dan daging melambangkan relasi dan persatuan integral antarmarga. Sagu atau Mahuze, kelapa atau Gebze, dan daging babi atau Basik-Basik yang merupakan bagian dari totem marga komunitas Malind Anim menjadi satu keutuhan yang menjadi jaminan bagi kelestarian kehidupan.

"Ketika seorang Malind makan sagu bakar atau sep sagu, sebenarnya ia tidak hanya sedang memenuhi kebutuhan fisik semata, tetapi sekaligus menyatukan diri dengan totemnya. Saat menyantapnya, ia merayakan Mahuze, Gebze, dan Basik-Basik. Yang jasmani dan rohani dipenuhi sekaligus," kata John Wob. Tak ada yang tahu, sampai kapan Wob dan manusia Malind Anim lainnya bisa merayakan totem-totem mereka....

# MENGUBAH ARAH KEBIJAKAN PANGAN

Satu kata kunci yang kerap terabaikan dalam menyusun cetak biru menyejahterakan masyarakat adat Papua adalah keberagaman masyarakat adat Papua. Tidak ada satu kebijakan yang bisa dengan pukul rata diberlakukan di Papua, pun dalam pangan.

Jumat (6/12) siang itu, warga Kampung Muai, Distrik Hubikosi, Kabupten Jayawijaya, terkumpul di sawah-sawah yang penuh padi yang siap dipanen. Di beberapa sudut petak sawah mereka, tumpukan panen padi menunggu giliran untuk dirontokkan gabahnya. Sebuah bilik tak beratap dibentuk dari terpal plastik menjadi tempat para lelaki merontokkan padi.

Dari balik bilik itu terdengar suara seikat padi yang dihantamkan ke sebuah drum ukuran 200 liter yang terguling di tengah bilik. "Beginilah cara kami merontokkan gabah panen kami karena kami tak punya mesin perontok," kata Boas Hisage. Ya, di Kampung Muai, beras adalah harapan Hisage dan para petani lain yang memimpikan kembalinya kejayaan budidaya padi di sana. "Kami mengenal budidaya beras sejak awal tahun 1990-an. Dahulu, luasan sawah di Muai jauh lebih besar dari luasan padi saat ini. Kini semakin banyak sawah yang ditinggalkan petaninya karena kami kesulitan memasarkan padi ke pasar. Jalan menuju pasar rusak, sewa mesin perontok padi pun mahal," tutur Hisage.

Inilah salah satu ironi pembangunan di Papua. Sementara orang-orang di Wamena harus merogoh kocek dalam-dalam gara-gara membeli beras terbang seharga Rp 19.000 per kilogram, potensi budidaya beras di Muai yang berjarak hanya sekitar dua jam perjalanan dari Wamena justru terbelengkalai. "Saya hanya ingin kalian melihat bahwa masalah pangan di Papua itu bukan perkara 'beras atau bukan beras'," kata Pater John Djonga Pr. "Kalau orang Muai makan beras, apakah itu masalah? Tidak, karena mereka menanam sendiri berasnya. Yang jadi soal hari ini adalah ketika begitu banyak orang Jayawijaya mengonsumsi sesuatu yang tidak mereka tanam, sambil meninggalkan tradisinya bertani. Bayangkan jika begitu banyak bantuan uang tunai dan anggaran beras miskin itu dialihgunakan menjadi peralatan kerja petani di Muai," kata Pater John.

Distrik Hubikosi bukan satu-satunya distrik penghasil beras di Jayawijaya. Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Markus Haluk menuturkan, kampungnya di Husinati, Distrik Walagama, juga menjadi lumbung beras sejak 1985. "Penanaman beras diperkenalkan seorang guru yang berasal dari Toraja kepada tetua kami, Make Itlay. Sejak saat itu, Make Itlay mengajak orangtua kami bercocok tanam beras. Sesekali kami menyantap beras, tetapi panen beras lebih banyak dijual di pasar. Hasilnya, saya bersekolah. Saya ini anak beras," kata Haluk.

Mirip dengan Muai, pertanian padi di Husinati mulai surut pada 1996 dan kini semakin hancur oleh kebijakan bantuan uang tunai dan beras miskin. "Kebijakan seperti itu merendahkan martabat kami sebagai petani-petani yang ulet. Sejak kecil kami diajarkan bahwa sumber kekayaan, kemakmuran, dan kejayaan orang gunung adalah cacing tanah dan, kini, kami justru meninggalkan cacing demi bantuan

uang dan beras," papar Markus.

Antropolog Johszua Robert Mansoben menyebutkan, latar belakang masyarakat adat pegunungan tengah Papua sebagai petani hipere membuat warga Muai dan Husinati cepat belajar berbudidaya beras. "Hal yang sebaliknya justru terjadi di sejumlah kantong transmigrasi di Nabire, Merauke, ataupun Keerom yang masyarakatnya terbiasa hidup dengan berburu dan meramu. Mereka sulit menyerap keterampilan budidaya beras," kata Mansoben. Kandidat Doktor Graduate School of International Relations Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang, yang meneliti konflik sosial di Papua, Nino Viartasiwi, menyebutkan, Papua mengalami berbagai perubahan sosial yang terlalu cepat dalam setengah abad terakhir dan perubahan sosial yang terlalu cepat menghalangi tumbuhnya budaya agraris pada masyarakat pemburu dan peramu di Papua, sebagaimana kegagalan orang Arso menjadi petani sawit.

"Dalam sebagian besar masyarakat adat di Papua, ada satu mata rantai perubahan sosial yang terlompati, yakni masyarakat agraris. Masyarakat melompat dari budaya berburu dan meramu ke budaya industri. Di sisi lain, pergeseran konsumsi adalah keniscayaan, orang Papua yang menjadi pegawai jelas tak mungkin mengandalkan pemenuhan pangan dari hipere yang tak bisa disimpan lama, padahal ia tak bisa lagi berkebun setiap hari," tutur Nino.

Nino menilai ketahanan pangan di Papua bukan sertamerta menjadi lebih baik jika masyarakatnya tetap berbudidaya hipere. "Sekadar menarik kembali masyarakat Papua untuk kembali menyantap hipere juga tidak akan menyelesaikan masalah. Artinya, pilihan pangan bukanlah persoalan utama. Yang menjadi persoalan adalah apakah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Itu harus

menjadi arah perbaikan kebijakan pangan di Papua,” ungkap Nino.

Di petak sawahnya sore itu, Boaz Hisage dan Pater John Djonga memperbincangkan kemungkinan warga Muai mendapatkan mesin perontok dan penggiling padi. “Sebenarnya itu bukan sesuatu yang sangat mahal. Kalau saja uang raskin itu dipakai untuk membelikan kami mesin perontok dan penggiling padi,” kata Pater John. Kalau saja....

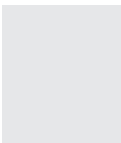
Kerusakan dan ancaman bencana kebijakan pangan yang terjadi di Papua seharusnya mulai membuat kita menahan diri untuk main pukul rata soal Papua. Arah kebijakan “memenuhi kebutuhan pangan sendiri” sebagaimana yang digagas Nino hanya mungkin tercapai jika kebijakan disesuaikan dengan tiap-tiap keragaman di Papua. Tanpa itu, alih-alih memanen pangan, kita justru akan memanen konflik.





**Antonius Ponco Anggoro**

Kelahiran Bandung, 5 Januari 1982, Antonius Ponco Anggoro sehari-hari adalah jurnalis dari Harian Kompas. Saat ini tinggal di daerah Pamulang, Tangerang Selatan.



**Gregorius Magnus Finesso**

Jurnalis Harian Kompas, berasal dari Yogyakarta, 13 Agustus 1982



**M Clara Wresti**

Jurnalis di Harian Kompas sejak 1995, bidang liputan yang pernah dilakukan : Perkotaan, kriminal, gaya hidup, transportasi dan infrastruktur. Lulusan SI Sastra Cina Universitas Indonesia ini, mempunyai hobi travelling dan memasak.

# JEJAK PERADABAN HOTONG, PANGAN ASLI PULAU BURU

Oleh: **A PONCO ANGGORO, GREGORIUS M FINESSO,  
M CLARA WRESTI**

dimuat dalam Kompas pada 19 Oktober 2013

**D**ari kejauhan, tanaman yang terhampar di lahan kering seluas sekitar 8 hektar di Waeperang, pesisir timur laut Pulau Buru, Maluku, itu terlihat seperti ilalang. Tingginya sekitar 1,5 meter. Namun setelah didekati, ternyata hotong (*Setaria italica*) atau yang disebut masyarakat setempat sebagai *feten*.

Berbeda dengan ilalang, di ujung setiap tangkai hotong dipenuhi malai atau untaian biji hotong. Malai yang berwarna coklat itu berimpitan dan memanjang hingga sekitar 15 sentimeter. Biji yang ada di malai itulah yang kemudian diolah menjadi makanan setelah dibersihkan dan dijemur.

“Sejak menanamnya tahun 2006, biji hotong hasil panen kami selalu dicari orang. Pembelinya tidak hanya dari Buru, tetapi juga dari Ambon, bahkan dari Jakarta,” ujar Arsyad Umasugi (52), salah satu petani hotong di Waeperang, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru.

Tahun 2004, Dinas Pertanian Kabupaten Buru mengambil bibit hotong yang banyak tumbuh di Waepotih, pedalaman Buru. Bibit itu lalu ditanam di Waeperang.

“Sejak dulu, hotong menjadi sumber makanan penduduk asli Pulau Buru yang hingga kini masih ada dan tinggal di pedalaman pulau. Karena itu, dinas pertanian mengambil bibitnya di pedalaman Buru untuk dibudidayakan di pesisir,” kata Ketua Gabungan Kelompok Tani Wal Holobagut, di Waeperang, Ismail Ang.

Budidaya hotong tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif. Hotong juga bukan tanaman manja sehingga dapat tumbuh dengan baik tanpa diberi pupuk. Hotong juga cocok di lahan kering, seperti di Waeperang atau di Buru.

Di awal penanaman, 153 petani Waeperang membudidayakan hotong di 153 hektar lahan kering. Dari setiap hektar diperoleh 1 ton biji hotong. Namun, sejak tahun lalu, hanya tersisa 10 petani, itu pun mereka menanam hotong dengan sistem tumpang sari dengan jagung, umbi-umbian, dan sayur-sayuran di lahan seluas 30 hektar.

“Kalau murni hotong sekitar delapan hektar saja,” ujar Ang.

Minat petani menanam hotong berkurang setelah ditemukan emas di kawasan Waeapo, di tengah Buru. Petani lebih memilih menambang emas secara tradisional daripada bertani. Akhirnya kebanyakan lahan pertanian itu dibiarkan telantar.

Meski harga jual hotong sebenarnya cukup tinggi, masyarakat menilai keuntungan dari emas jauh lebih besar. Satu kilogram (kg) hotong dihargai hingga Rp 50.000. Arsyad yang beberapa waktu lalu baru panen hotong, bisa memperoleh sekitar 50 kg hotong. Artinya dalam waktu 90 hari, masa waktu tanam hingga panen hotong, ia bisa memperoleh pendapatan Rp 2,5 juta.

“Itu belum seluruh hotong dipanen. Total ada satu hektar yang saya tanami hotong, dan dari satu hektar itu bisa

diperoleh sampai satu ton biji hotong,” kata Arsyad.

Menurut Ang, tingginya harga jual hotong lebih karena hukum pasar, yaitu pasokan hotong petani yang belum bisa mencukupi permintaan. “Pembeli antre untuk bisa membeli hotong. Mereka senang dengan hotong sehingga ketika panen tidak perlu menunggu lama, selalu habis dibeli,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Buru sering membawa hotong saat pameran di luar Buru. Inilah yang mendorong orang-orang di luar Buru kian mengenal hotong dan mencarinya.

Karena minimnya pasokan, tidak mudah untuk memperoleh hotong di Buru, baik dalam bentuk biji maupun sudah berupa makanan. Untuk memperoleh hotong harus pergi ke Waeperang, sekitar 30 kilometer dari Namlea, ibu kota Kabupaten Buru. Karena itu pula, belum banyak warga Buru yang tinggal di pesisir mengenal hotong.

Dulu, hotong tak sebatas makanan bagi penduduk Buru. Hotong juga menjadi bagian dari budaya masyarakat Buru karena hotong merupakan bagian utama dari upeti kepada raja yang ditaruh di *dolang* atau wadah persembahan bersama hasil bumi lainnya. Bahkan, konon, *feten* diibaratkan seperti seorang puteri karena bijinya yang halus dan ujung malai yang berubah merah seperti bibir puteri saat siap dipanen.

Namun, kini, beras telah menggeser hotong. Padahal, penelitian Institut Pertanian Bogor menyebut kandungan karbohidrat pada hotong sebanyak 81,32 persen atau lebih tinggi daripada beras yang hanya 70-80 persen. Kandungan protein hotong mencapai 14,05 persen atau lebih tinggi daripada beras yang hanya 4-5 persen. Hotong juga dinilai memiliki kandungan antioksidan yang dapat mencegah kanker.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buru Wara

mengatakan, potensi budidaya hotong di Buru sangat besar mengingat luasnya lahan kering di sana. Dari lahan kering seluas sekitar 6.000 hektar, baru sekitar 400 hektar yang dimanfaatkan.

Kian dikenalnya hotong pun mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Buru terus mengembangkan hotong, apalagi hotong merupakan pangan lokal Buru. Perluasan budidaya hotong sedang diupayakan di kawasan lain, seperti di Wabloy, Kecamatan Waeapo. "Kami rencanakan ada sekitar 50 hektar lahan yang siap ditanami hotong," ujarnya.

Namun, upaya ini tidaklah mudah mengingat saat ini petani lebih memilih mencari emas. "Tidak hanya petani lahan kering yang berkurang, juga petani lahan basah. Ini mengancam posisi Buru sebagai lumbung beras Maluku," ujar Wara.

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Arivin Rivaie mengatakan, di Maluku, hotong hanya dapat ditemui di Buru. Dia menilai, budidaya hotong juga cocok dilakukan di tenggara dan selatan Maluku atau daerah lain di Indonesia yang udaranya panas dan lahannya kering, seperti di Buru. "Hotong tidak bisa terkena banyak air karena justru akan membuat hotong membusuk," ujar Arivin.

Hingga kini, masyarakat Buru biasanya mengolah hotong untuk menjadi bubur. Padahal selain bubur, hotong bisa juga diolah menjadi wajik, makanan ringan, mi, bahkan roti. BPTP Maluku telah menguji coba pengolahan hotong menjadi beragam makanan itu.

Namun, harga hotong yang tinggi menjadi salah satu kendala pengolahan hotong menjadi beragam makanan. Tingginya harga itu membuat produk olahan hotong kalah bersaing dengan makanan sejenis.

Arivin mengatakan, untuk meningkatkan produksi hotong, BPTP Maluku pada 2012 melakukan penelitian memanfaatkan limbah sagu sebagai pupuk organik untuk tanaman hotong. Pemberian pupuk dan pengaturan jarak tanam ini diharapkan mampu memperbaiki teknik budidaya hotong.

Hasilnya, produksi panen hotong bisa ditingkatkan lebih dari 40 persen dan pendapatan petani bisa dinaikkan hingga lebih dari 20 persen. "Tinggal pemerintah saja mau mendorong budidaya dan pengembangan hotong atau tidak," kata Arivin.



**Shinta Maharani**

Perempuan kelahiran Banyuwangi, 30 Maret 1985 ini, mempunyai jam terbang tinggi sebagai jurnalis. Mengawali bekerja di Harian Jogja pada tahun 2008, Shinta Maharani kemudian merasakan bekerja di berbagai media, seperti Antara biro DIY, radio Sonora dan sekarang berlabuh di Tempo biro Jateng-DIY. Lulusan S1 Hubungan Internasional, FISIP UPN Veteran Yogyakarta ini pernah meraih berbagai penghargaan jurnalistik, antara lain : Liputan Perubahan Iklim 2014 (AJI Jakarta dan Indonesia Climate Change Trust Fund - ICCTF), Fellowship for Journalists "Better Journalism for Better Environment"

2014 (AJI Indonesia – WWF Indonesia), Beasiswa Liputan Sustainable Consumption and Production Switch Asia 2014 (Uni Eropa - AJI Yogyakarta), Finalis Diversity Award 2014 (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman), Peraih Beasiswa Liputan Isu Keberagaman 2013 (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman). Selain bekerja sebagai jurnalis Tempo, Shinta Maharani aktif berorganisasi, saat ini menjadi koordinator Divisi Gender Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.

# BALIK KE BERAS LOKAL, SEHAT DAN BERDAULAT

Oleh: **SHINTA MAHARANI**

dimuat dalam Tempo.co pada 24 Desember 2014

YOGYAKARTA - Bibit padi tumbuh subur menghijau pada petak sawah tergenang air. Sarjono, 56 tahun, duduk di timba kecil yang ia balik, menghadap petak bibit itu. Hati-hati Sarjono mencabut akar padi berumur dua puluh hari itu. Lalu, ia mencelupkannya ke dalam kubangan air supaya bersih. Bibit padi selanjutnya ia kumpulkan berjajar. Benih yang Sarjono cabut merupakan varietas padi lokal bernama Genjah Rante.

Petani Gilangharjo, Pandak, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ini menanam benih itu pada petak lahan 150 meter persegi. Musim tanam akhir jelang penghujung Desember tahun ini telah tiba, Sarjono bersiap menanam benih padi itu di lahan miliknya. "Ini musim tanam yang baik. Saya ikut pranata mangsa (perkiraan waktu) tanam yang dibicarakan di dalam kelompok tani," kata Sarjono.

Sarjono merupakan anggota kelompok tani Lumbung Tani Lestari. Kelompok tani ini menerapkan sistem pertanian berbasis kemandirian. "Kami hanya menanam benih padi lokal, menggunakan pupuk alami dari kotoran ternak dan dedaunan agar menjadi kompos," kata Koordinator Bidang Pertanian Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Tyas Manunggal Mulyono, Selasa, 23 Desember 2014.

Kelompok tani Lumbung Tani Lestari merupakan anggota Koperasi Tyas Manunggal. Sebanyak 20 petani yang menjadi anggota kelompok. Sarjono satu di antaranya, punya saham di koperasi itu. Kelompok tani telah berdiri sejak enam tahun lalu. Mereka berhimpun ke koperasi sebagai upaya mereka untuk mandiri dalam keuangan.

Koperasi Tyas Manunggal berkantor pusat di Ganjuran, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul. Koperasi ini punya bidang yang berhubungan dengan pertanian, seperti bidang pertanian maupun pangan lokal yang sehat. Selain petani, koperasi ini juga menghimpun anggota dari kalangan pedagang, pegawai negeri sipil, dan aneka jenis pekerjaan lainnya. Jumlah anggota sebanyak 1.300-an orang, dengan aset sekitar Rp 12 miliar.

Sarjono mengatakan padi jenis Genjah Rante menghasilkan panen yang baik. Sekali panen, ia bisa memetik 640 kilogram gabah pada petak lahan seluas 150 meter persegi. Sarjono punya total lahan sawah seluas 3 ribu meter persegi. Harga hasil panen padi varietas lokal itu tak kalah dengan beras nonlokal IR64 yang lebih dikenal oleh masyarakat.

Harga gabah kering jenis Genjah Rante Rp 4.500 per kilogram dan dalam bentuk beras Rp 9.000. Sedangkan harga gabah kering IR64 Rp3.500-4.000 per kilogram. Dalam bentuk beras, IR64 per kilogram berharga Rp 8.600-Rp 9.000. Cita rasa beras lokal Gajah Rante pun tak kalah enak dengan beras IR64.

Sarjono memilih untuk menanam padi varietas lokal karena budidayanya jauh lebih mudah dibandingkan padi jenis lainnya, seperti IR64 dan jenis padi hibrida. Dia tak perlu menggunakan pupuk kimia dalam dosis besar seperti pada jenis padi nonlokal. Sarjono hanya menggunakan pupuk dari kotoran sapi miliknya.

Dia mencontohkan untuk lahan dengan panjang sepuluh

meter dan lebar satu meter hanya perlu biaya budi daya sebesar Rp 7 ribu. Biaya budi daya ini meliputi pembelian benih dan perawatan padi. Padi Genjah Rante lebih tahan terhadap hama. Sehingga, ia tak perlu keluar duit untuk beli pestisida. “Kalau menanam padi IR64 pasti ongkosnya lebih mahal karena perlu lebih banyak menggunakan pupuk pabrik dan pestisida,” katanya.

Koordinator bidang pertanian Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Tyas Manunggal Mulyono mengatakan hampir semua anggota kelompok tani Lumbung Tani Lestari menggunakan benih padi varietas lokal. Setiap hektare petani mampu menghasilkan delapan ton gabah kering dalam sekali panen.

Harga gabah jenis ini tidak anjlok ketika panen raya tiba. Selain varietas Genjah Rante, petani juga menanam varietas lokal lainnya, di antaranya Mentik Susu. Beras produksi petani Kecamatan Pandak ini telah dijual ke Bandung, dan Jakarta secara ajek. “Pasar lambat laun menyukai beras varietas lokal yang lebih sehat dikonsumsi karena tak banyak pupuk kimia dan pestisida,” kata Mulyono. Ia juga jadi penggerak bagi anak muda agar suka menjadi petani.

Selain mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, mereka rata-rata memiliki tabungan di koperasi. Mereka bisa meminjam uang di koperasi untuk mengembangkan usahanya. Misalnya untuk beternak lele, sapi, kambing, membeli tanah pekarangan, dan memperluas kepemilikan lahan sawah.

Keberhasilan kelompok tani Lumbung Tani Lestari di Gilangharjo Pandak tak lepas dari peran Hery Astono. Ia ketua kelompok tani Lumbung Tani Lestari Dusun Dowaluh, Trirenggo, Bantul. Inisiatif mendirikan kelompok ini muncul

setelah gempa menghajar Yogyakarta pada Mei 2006. Tak lama setelah gempa, masyarakat trauma terhadap alam atau kurang bergairah pergi mengolah sawah.

Kondisi ini membuat organisasi non-pemerintah, Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan turun tangan. Supaya masyarakat bangkit, mereka meminjami benih beras merah varietas lokal bernama Saodah. Waktu itu benih ditanam pada lahan seluas dua hektare dan berhasil panen baik. “Ini jadi titik balik sehingga lumbung padi mulai hidup,” kata Hery Astono. Lalu, ia menularkannya kepada kelompok tani di Gilangharjo, Pandak, Kecamatan Tlirenggo.

Sebenarnya, petani sudah sejak nenek moyang telah mengenal lumbung padi. Namun lumbung lambat laun mati sejak tahun 1976, akibat kebijakan revolusi hijau Presiden Soeharto. Padi varietas lokal kalah dan terpinggir karena pemerintah gencar mengenalkan varietas baru nonlokal yang tumbuhnya mengandalkan pupuk kimia dan semprotan pestisida.

Sehingga, beras jenis padi nonlokal lebih banyak mendominasi pasaran. Beras varietas lokal “hilang” dari petani. Namun buruk akibatnya, petani tak tertarik menyimpan padi nonlokal di lumbung. Sebab, jenis padi nonlokal pada umumnya tak tahan lama disimpan di lumbung. “Ini beda dengan padi lokal yang tahan lama,” kata Hery Astono.

Ia mengatakan lumbung adalah sebuah sistem, bukan hanya sebuah bangunan. Ketika musim paceklik tiba, petani meminjam gabah di lumbung milik kelompok tani. Ketika musim panen tiba, mereka akan mengembalikan gabah yang dipinjam. Mereka menggunakan sistem simpan pinjam 10-12. Jika mereka sebelumnya, misalnya pinjam sepuluh kilogram, ketika panen mengembalikannya 12 kilogram gabah.

Kelebihan pengembalian gabah ini menjadi milik bersama dalam koperasi, sekaligus menjadi cadangan menghadapi musim paceklik.

Lumbung menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Sebab, lumbung menjaga benih padi. Stok beras akan habis kalau tak ada benih untuk ditanam. "Jadi, lumbung tak semata tumpukan gabah, tapi sitem kemandirian," katanya.

Petani berdaulat atas pangan, benih, pupuk, dan sukses memasarkan produknya. Mereka tak pernah kelimpungan ketika harga benih naik karena punya cadangan sendiri. Selain itu, ketika pupuk kimia langka, mereka tenang karena mereka mengandalkan pupuk organik yang mereka olah sendiri dari kandang sapi dan kambing miliknya.

Setiap musim panen tiba, di satu lokasi bisa memanen hingga sebelas ton per hektare. Varietas nonlokal bisa panen hingga sepuluh ton per hektare. Ini sekaligus meruntuhkan cap buruk bahwa benih padi varietas lokal itu penyakitkan dan rendah produktivitasnya.

Gagasan lumbung padi makin berkembang. Pada tahun 2010, kelompok tani mulai memasarkan produknya yang melimpah. Mereka menjual beras panenannya ke Jakarta dan Bogor. Satu keluarga petani rata-rata mampu menjual seratus kilogram beras dalam sekali musim panen.

Tabungan petani di koperasi adalah satu di antara cara untuk mengukur petani di desa itu sejahtera. Aset koperasi setiap tahun selalu berkembang. Tahun 2013, misalnya, aset Koperasi Simpan Pinjam Tyas Manunggal sebesar Rp 12 miliar. Pada akhir tahun 2012, aset koperasi sebesar Rp 9 miliar. Ada kenaikan aset yang lumayan.

Aliansi Desa Sejahtera mengapresiasi usaha kelompok tani bertahan dengan benih varietas lokal dan menciptakan

kemandirian pangan. Organisasi non-pemerintah itu mencatat angka impor produk pertanian Indonesia sangat tinggi. Rata-rata impor beras misalnya per tahun hampir mencapai 2 juta ton. Sedangkan, gandum mencapai tujuh ton. Angka impor Indonesia terhitung sejak tahun 2003-2013 melonjak hingga 346 persen.

Koordinator Nasional Aliansi Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko menyatakan, kondisi yang kian memprihatinkan menimpa petani yang jumlahnya semakin berkurang. Tejo merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2013 yang menyebutkan Indonesia kehilangan petani sebanyak 5 juta orang.

Selain itu, jumlah lahan pertanian semakin menyusut akibat alih fungsi lahan. Laju kehilangan sumber pangan mencapai 6,4 persen atau setara dengan 100 ribu hektare lahan hilang per tahun pada kurun 2003-2013. "Ini lampu merah, Indonesia darurat pangan," katanya.

Peneliti Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Amalia mengatakan Indonesia tidak perlu impor, jika pembuat kebijakan peduli tentang beragamnya varietas produk pertanian. Setiap daerah di Indonesia memiliki beraneka varietas lokal sumber karbohidrat dari pangan.

Dia mencontohkan, Papua yang punya 400 varietas sumber karbohidrat. "Pembuat kebijakan malas dan tak mau berkeringat untuk membela rakyat. Bagi mereka yang penting keluaran regulasi," katanya.

Menurut dia, peran kelompok tani di pedesaan penting untuk menjaga ketersediaan pangan. Selain itu, mereka menjalankan usaha mengikuti musim. Misalnya ketika musim kemarau tiba, kelompok tani di Yogyakarta memanfaatkan umbi-umbian untuk diolah menjadi tepung. Umbi-umbian

itu bisa ditanam pada lahan yang bukan untuk komersial. “Ini membuat mereka mandiri dan punya ketersediaan pangan yang cukup,” katanya.



**Irvan Imamsyah**

Bekerja sebagai jurnalis sejak tahun 1998, dengan mengawali karir di harian Monitor Indonesia Daily, berlanjut ke tabloid Daulat Rakyat, portal Jaknews.com, TV Lativi dan sekarang di agensi berita radio KBR68H. Jabatan terakhir adalah News Manager for Region KBR68H. Selain di KBR68H, Irvan Imamsyah juga menjadi editor di program SAGA (Bulletin Pagi) dan TempoTV. Pria kelahiran Jakarta, 18 Juni 1978 ini adalah lulusan S1 Jurusan Jurnalistik, Fakultas Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Jakarta. Hobinya selain membaca, menulis dan diskusi, Irvan Imamsyah juga menggemari kegiatan memasak, melancong termasuk hiking dan diving, serta sedang belajar bercocok tanam layaknya petani.

# PETANI BENIH BERDAULAT DI LAHAN SENDIRI

Oleh: **IRVAN IMAMSYAH**

dimuat dalam Portalkbr.com pada 29 Januari 2014

*KBR68H - lewat tangan Joharipin, benih padi Bongong bisa dipanen hingga 11 juta ton lebih di lahan seluas satu hektar. Hasil panen yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan hasil produksi benih padi hibrida yang digagas pemerintah. Bongong adalah satu dari 50 varietas benih yang telah dimurnikan terus menerus oleh Joharipin bersama kelompoknya. Tapi ironi, sampai kini pemerintah masih belum berpihak pada petani pemulia tanaman di dalam negeri.*

**D**i areal persawahan Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya, Indramayu, Jawa Barat para petani mulai beranjak pulang menuju rumah. Tapi di salah satu lahan seluas tiga kali lapangan bulutangkis, Joharipin sibuk mencermati pertumbuhan benih padi yang ditanamnya. Setiap musim tanam dimulai, Joharipin punya kerja tambahan. Dia punya gawe memurnikan benih padi rakitannya demi mencari benih unggul yang lebat bulir-bulirnya.

“Ini proses permurnian, kita bagi ini satu meter setengah. Ke sananya 20 meter. Nanti kita bisa hitung. Ini baru enam hari. Kurang menyenangkan. Kalau sudah ngelilir, segar. Ini

tanamnya satu-satu. Jangan satu lobang ramai-ramai,” jelas Johar.

Waktu disambangi, lelaki berusia hampir 40 tahunan itu tengah memurnikan 18 galur benih hasil rakitan di lahannya. Bapak tiga anak itu punya lebih dari dua hektar sawah untuk menopang kebutuhan hidup keluarganya. Dari dua hektar lahannya, lahan seluas tiga kali lapangan badminton disisakan untuk memurnikan benih-benih padi.

Joharipin punya alasan, mengapa ia tertarik melahirkan benih padi idaman. “Dengan program Revolusi Hijau itu, harus semua daerah harus pakai benih yang seragam satu jenis. Akhirnya benih-benih yang lain tidak ada. Monokultur. Jadi keanekaragaman hilang. Apalagi benih-benih lokal, tidak cocok, tidak dipakai lagi, karena harus pakai benih yang umurnya genjah (cepat tumbuh-red). Supaya mempercepat. Dengan berbagai dalih itulah, keanekaragaman benih-benih itu hilang. Nah bagaimana kita melakukan kerangka pemuliaan, intinya memperkaya varietas. Sehingga petani punya pilihan,” tegasnya.

Revolusi Hijau yang disinggung Joharipin berlangsung saat Soeharto memerintah negeri ini. Konsep Revolusi Hijau yang dikenal sebagai gerakan bimbingan masyarakat itu merupakan program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras. Sedang target swasembada beras ditetapkan dengan mitos bakal menjadi komoditas strategis, baik dari sisi pandang ekonomi, politik dan sosial.

Gerakan bimbingan masyarakat yang diserukan Soeharto dengan mengutamakan penggunaan benih unggul. Tapi agar bisa tumbuh optimal, petani diharuskan menggunakan pupuk kimia untuk menggenjot produksi, juga pestisida

untuk menghalau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Revolusi Hijau yang diserukan saat itu oleh pemerintah Soeharto menurut Joharipin menyebabkan petani sangat bergantung pada benih, pupuk dan pestisida yang dijual oleh perusahaan negara, swasta dan multinasional. Tapi dengan upaya ekstra itu, swasembada pangan yang diraih hanya berumur lima tahun saja, yakni pada 1984 - 1989.

Untuk menghapus ketergantungannya kepada benih perusahaan itu pula yang mendorong Joharipin belajar memuliakan benih pada 2004 silam. Sejak itu pula, Joharipin menjadi paham mengapa benih menjadi hal yang utama dalam usaha taninya. "Jadi kita mencoba melakukan pemuliaan benih karena usaha pertanian 60 persen faktor utama keberhasilan adalah benih. Produktivitas tinggi dan kualitas bagus itu juga termasuk tergantung benihnya sendiri. Karena secara umum mahluk hidup itu ada empat. Tumbuhan, manusia, binatang dan mikro organisme. Jadi harus hidup bebarengan. Saling hormat-menghormati dan saling sayang-menyayangi di antara keempat mahluk hidup itu," pungkasnya.

Joharipin adalah satu dari sedikit petani di Indonesia yang tak lagi mengandalkan benih milik perusahaan yang lama bercokol di lahan pertanian warga. Karena sejak bisa merakit benih sendiri, ia tak lagi membeli benih produksi dalam negeri dari PT. Shangyang Sri dan PT. Pertani. Termasuk benih dari perusahaan asing, seperti Monsanto Indonesia.

"Tapi untuk konsumsi keluarga sekolah, kita produksi satu Bongong. Saya tak pernah beli benih. Benih apa pun saya sudah punya. Nah jangan ngomong-ngomong sejahterakan rakyat, apa sejahtera wong rakyatnya masih bergantung pada pihak lain kok sejahtera. Harus mandiri dulu baru sejahtera," tegasnya.

Bersama Kelompok Peduli Karya Petani dia telah memuliakan 50-an benih padi unggulan. Mulai dari varietas Bongong (persilangan benih padi kebo dan longong-red), gading merah dan putih, selong, senapati, juga benih dengan nama unik, "alhamdulillah". Setiap jenis benih itu punya keunggulan dan kelemahan masing-masing.

"Banyak, punya saya namanya Bongong sudah terkenal ke mana-mana. Sampai tahun kemarin diuji langsung disaksikan perangkat desa dan PPL para penyuluh. Bahkan disaksikan anggota DPRD, pasca panen. Diuji coba unggul nasional BLBU dengan benih saya. Setelah diubin dapat 11,3 6 ton per hektar. Rasa sudah pulen, tidak beraroma. Biasa. Tengkulak juga masuk. Kalau unggul nasionalnya dapat 8,93 ton. Itu musim kemarin."

Seperti saat musim gaduh lalu, Joharipin menanam gading merah dan putih di lahannya sendiri. Hasilnya mencapai 9 ton per hektar dengan biaya yang murah. "Kemarin ada ledakan wereng, tapi lahan saya dengan gading tak terkena serangan hama wereng juga. Penyemprotan juga buat sendiri. Dari buah maja, brenuk, campur air kelapa. Varietas Ciherang berapa kali penempatan, kena (OPT-red). Saya cuma dua kali. Itu gading," jelasnya.

Dengan hasil panen yang memuaskan itu, Joharipin dan kelompok taninya makin percaya diri kalau benih karya mereka tak kalah hebat dengan benih yang dijual perusahaan. Rata-rata produksi dari benih buatan Joharipin dan kelompok taninya mencapai 9 ton per hektar.

Tapi sayang, petani pemulia seperti Joharipin belum dapat sokongan pemerintah. Bahkan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Tanaman yang diterbitkan pada tahun 1992 silam tak memberi peluang bagi petani untuk membuka usaha

budidaya tanaman. Mereka tak boleh memperjualbelikan benih sebelum mendapatkan sertifikat dan izin edar dari Kementerian Pertanian.

Tapi belum lama, Joharipin tengah menjajaki pelbagai persyaratan yang diminta pemerintah. Kebetulan dia disertakan Balai Besar Penelitian Padi di Subang untuk mematenkan benihnya bersama perusahaan dan lembaga produsen lain. Tapi dalam perjalanannya, dia menyebut banyak praktek curang dalam proses mendapatkan sertifikasi benih. Misalnya saat menguji ketahanan benih dari serangan hama.

“Pas dilakukan uji tahan OPT. Kalau varietas yang tahan OPT itu khan tak perlu gunakan pestisida. Tapi itu harus gunakan pestisida sebagai pengendaliannya. Itu artinya benih apa? Tahan karena pestisida. Bahkan dari BP Biogen kena wereng itu. Saya laporkan ke Balitbang yang jadi panitianya. Bu bagaimana nih benih yang dari BP Biogen ada yang kena wereng. Pak Johar tolong disempromt pakai pestisida. Enggak bu, ini khan diuji kalau yang gak tahan berarti gak masuk khan. Jangan pak Johar, nanti saya bisa kena marah atasan. Saya males ngejar-ngejar kebijakan macam itu,” jelas Joharipin kesal.

Ikut rombongan konsorsium otomatis Joharipin tak perlu keluar uang. Gratis. Menurut keterangan pejabat Dinas Pertanian Indramayu kepadanya, biaya mematenkan satu benih bisa menghabiskan uang hingga Rp 500 juta. “Petani tak mungkin akan mensertifikasi benih. Untuk mendapatkan hak paten. Karena untuk mendapatkan hak paten, benih mendapatkan sertifikat itu mahal. Kata kepala dinas waktu itu bilang sampai Rp 500 juta. Untuk dapat sertifikasi benih.”

Ongkos nan mahal itu, tak lain untuk biaya uji tanam

pada sepertiga wilayah Indonesia. Karena itu, petani semacam Joharipin hanya sanggup melakukan uji multilokasi secara lokal. Antar kecamatan saja. “Lebih murah malah. Mungkin itu untuk menakut-nakutin petani, supaya tidak mampu. Yang mampu perusahaan,” katanya.

Saat ini dua benih hasil rakitan Joharipin masih bertahan dalam uji lokasi lanjutan di sejumlah daerah. Sambil menunggu hasil uji lokasi, Joharipin nekat menjual benih unggulnya ke petani yang berminat. Satu kilogram benih Bongong dijual delapan ribu rupiah. Lima ribu untuk modal budidaya, sedang tiga ribu rupiah untuk kas kelompok taninya. Dia yakin, cara yang ditempuhnya itu aman hindari jerat hukum.

Sementara pascaputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi UU Sistem Budidaya Tanaman Juli 2013 lalu, petani hanya dibolehkan memuliakan benih dan bertukar benih di dalam komunitasnya. Untuk bisa komersil, petani tetap diwajibkan mendapatkan sertifikat dan izin edar dari Kementerian Pertanian.

## PETANI BENIH BERDAULAT DI LAHAN SENDIRI (2)

**S**ebelum Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan atas Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman Juli 2013 lalu, petani tak dibolehkan memuliakan benih-benih tanaman pangan. Dengan aturan itu, pemerintah hanya menempatkan petani sekadar produsen sekaligus konsumen pangan. Tugasnya hanya menanam, merawat, memanen dan hasilnya untuk membeli makan dan kebutuhan hidup lainnya.

Muhammad Nuruddin, Ketua Aliansi Petani Indonesia (API) yang mendampingi petani menjelaskan alasan pengajuan gugatan uji materi undang-undang tersebut pada September 2012. “Asumsinya Undang-undang diimplementasikan sudah sekian puluh tahun baru ada korban. Korbannya itu 14 petani pemulia tanaman jagung di Kediri. Kasusnya memang paling banyak di Kediri, satunya ada juga di Pengadilan Tulungagung tapi dimenangkan. Pengadilan Tulungagung cukup jujur melihat sengketa pencurian benih tanaman jagung ini dan Magetan. Jadi setelah ada 14 korban itu, kemudian para petani itu kami ketemukan dengan pemulia tanaman padi di Indramayu. Pak Warsiyah dan kawan-kawan termasuk Pak Joharipin juga menghadapi kendala yang sama, mereka ditakut-takuti oleh institusi pemerintah entah itu dinas pertanian atau balai tanaman pangan di Indramayu itu,” kata Nuruddin.

Gugatan uji materi diajukan setelah Tukirin dan Kuncoro,

dua petani asal Nganjuk dan Kediri, Jawa Timur diseret ke meja hijau oleh PT BISI Internasional. Perusahaan benih itu merupakan anak usaha perusahaan agorbisnis raksasa asal Thailand, Charoen Pokphand. Oleh PT BISI, kedua pemulia dituduh mengkomersilkan benih hasil persilangan milik perusahaan dengan benih jagung lokal.

Benih yang dijual keduanya punya dua keunggulan, seperti hasil melimpah dan bisa ditanam berulang kali. Sementara benih jagung hibrida yang dijual perusahaan hanya bisa ditanam sekali, untuk setiap musim tanam. Belasan petani di Jawa Timur itu lantas diperkarakan ke pengadilan dengan tuduhan mencuri benih induk milik perusahaan.

Menurut Muhammad Nuruddin, Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman digugat ke MK karena memberikan ruang kepada pemerintah untuk meremehkan kemampuan petani memuliakan benih tanaman pangan. "Bahwa mereka meremehkan kemampuan pengetahuan lokal dan kearifan lokal petani itu tak sanggup untuk membuat perakitan, model pengetahuan petani itu menghasilkan varietas baru yang juga sama-sama unggul, sama dengan varietas yang dihasilkan oleh pengetahuan yang secara ketat diterapkan melalui instrumen penelitian. Unggul kualitas dan kuantitas serta daya tahan. Karena ada beberapa variabel yang harus diuji. Ketahanan terhadap cekaman iklim, kemudian unggul tahan terhadap serangan hama penyakit dan bersertifikat. Harus ada lembaga yang mengeluarkan sertifikat kalau benih sudah lolos secara laboratorium," jelasnya.

Tudingan yang disampaikan Muhammad Nuruddin dibenarkan Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor yang juga Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (ABBTI). Menurutnya pemuliaan benih adalah pengetahuan sederhana yang sudah ada sejak

zaman Mesir kuno. Jadi jelasnya, petani atau siapa pun juga bisa memuliakan benih tanaman.

“Di Universitas-universitas besar di Amerika sana, ya sama saja dengan apa yang dilakukan masyarakat Mesir 4.000 tahun yang lalu. Dalam arti, proses pemuliaan tanaman itu tak membutuhkan pengetahuan yang luar biasa, fasilitas yang luar biasa. Sama sekali tidak. Itu hanya memerlukan kesabaran, memerlukan waktu, memerlukan sumber daya yang besar.”

“Karena itu proses seleksi. Dalam arti, varietas A dikawinkan dengan varietas B, lalu kemudian disebar di lahan. Dilihat keragaannya. Dipilih yang cocok dengan kita. Diambil lagi dan dimurnikan lagi terus menerus sampai sekian generasi, taruhlah kalau padi sampai 9 generasi, sehingga dia jadi galur yang murni. Ini khan perlu tenaga besar. *Take's time,*” kata Dwi Andreas.

Menurut Andreas, pemerintah juga bisa berhemat uang subsidi benih, jika para petani diberi kebebasan untuk memuliakan benih dan memperjualbelikan di kalangan para petani sendiri. Gagasan itu sempat dia sampaikan kepada Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian saat itu, Udhoro Kasih Anggoro. Dia menyarankan agar 20 persen dari anggaran penyediaan benih sebesar Rp 1,45 triliun digelontorkan ke petani untuk pengembangan benih-benih lokal. Dia bahkan menantang pemerintah untuk membandingkan hasil benih hasil pengembangan petani dengan benih asal perusahaan.

“Lalu jawabnya Pak Anggoro sederhana, ya tak bisa. Ya tak bisa bagaimana kan dalam wewenang *jenengan*? Ya tak bisa, mas Andreas, ini kan dananya yang pegang bukan kami, yang pegang Kementerian Keuangan. Nah ya itu celaknya republik kita. Sebenarnya bisa, tapi berkilah saja. Rp 1,45 triliun bukan wewenang kami. Itu kan ironis. Padahal kan kita tanya

ke petani di jaringan, saya tantang berani atau tidak nanti satu kabupaten seluruh benih dihasilkan *jenengan*. Ohh sanggup. Paling hanya 50 ton. Jadi tak ada problem,” ungkapinya.

Dwi Andreas Santosa mengatakan beragam gagasan sempat disampaikan pemerintah karena dia melihat kedaulatan petani atas penggunaan benih dalam tahap yang memprihatinkan. Apalagi jumlah pemulia tanaman di tanah air tidak banyak. Menurut hitungannya, Indonesia hanya punya 100 pemulia tanaman. Sebagian dari mereka petani, akademisi dan peneliti dari sejumlah lembaga penelitian.

Tapi tahu kondisi sektor usaha tani di negeri ini memprihatinkan, pemerintah tetap berkeras pada aturan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Dalih Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian P. Bambang Budhianto, untuk melindungi petani sebagai konsumen benih.

“Untuk petani kecil boleh mengumpulkan plasma nuftah dan melakukan pemuliaan tanaman sehingga dihasilkan suatu galur. Dan galur ini benihnya diperbanyak boleh, tapi hanya komunitasnya sendiri. Tidak boleh untuk komersial. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Menurut dia, petani boleh mengkomersilkan benih ciptaannya dengan syarat telah mendapatkan sertifikat dari kementerian pertanian. “Varietasnya harus jelas, dilepas oleh menteri pertanian dan proses produksi benihnya lewat sistem sertifikasi. Kalau menurut saya petani-petani ini lebih baik berbudidaya yang baik menghasilkan produktivitas yang tinggi,” paparnya.

Bambang menyarankan seperti itu karena tak yakin dengan kemampuan petani jika harus bersaing dengan perusahaan benih multinasional. Menurutnya petani tak akan sanggup

karena perusahaan punya banyak modal dan menguasai teknologi perbenihan yang mutakhir. Tak hanya petani, Bambang juga menganggap perusahaan benih milik negara tak punya cukup kemampuan untuk memupus cengkraman perusahaan benih asing di Indonesia.

“Perusahaan-perusahaan nasional saja tak punya kapasitas untuk bersaing saat ini dengan multinasional. PT. Shangyang Sri kan mengandalkan dari Badan Litbang Kementerian Pertanian, sama dari vendornya dia. Belum ada varietas ciptaan Shangyang Sri. Karena perusahaannya 40 tahun hanya memproduksi benih.”

“Mohon maaf ada yang meledeknya begini, penangkar kelas raksasa. Mereka punya *breeding center*, tapi apakah *breeding center* mereka sudah bisa seperti perusahaan multinasional yang besar. Ini yang perlu kita tingkatkan. Saya sebagai orang pemerintah ingin melihat BUMN kami, apalagi Shangyang Sri bisa seperti itu,” ujar Bambang saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Itu sebab, saat ini pemerintah lebih menopang perusahaan benih swasta nasional untuk bersaing dengan perusahaan benih asing seperti; Pioner, Dupont, Syngenta, PT Bisi Internasional dan bahkan Monsanto Indonesia. Utamanya untuk bersaing di pasar benih padi, kedelai dan jagung hibrida.

“Ada namanya Agri Makmur Pertiwi, itu di Kediri. Dia berani berhadap-hadapan dengan PT Bisi Internasional. Golden Sheet Indonesia di Malang, Saprotan Utama di Klaten terus Ente di Padang Sumatera Barat. Ini contoh-contoh saja mereka kita dorong. Sebelum itu boro-boro 30 persen. Kecil peranan lokal. Sekarang ini kita dorong dan mereka sudah mengambil market 30 persen, terutama Pertiwi. Kalau bisa kita tambah jadi 40 - 50 persen. Paling tidak *trend-setting*-nya tidak

lagi mereka yang mengatur," imbuhnya.

Meski begitu, Pemerintah tetap mengklaim terus menyokong upaya petani untuk memproduksi benih tanaman. Menurutnya, saban tahun pemerintah menyediakan dana Rp 50 miliar untuk kelompok petani penangkar benih. "Kita dorong petani yang mau. Dua tahun terakhir kami memberikan bantuan untuk petani penangkar benih. Rata-rata Rp 50 miliar setiap tahun. Satu unit 50 hektar kita kasih duit Rp 175 juta untuk penangkar. Rp 50 juta buat beli peralatan, Rp 125 juta untuk modal kerjanya."

Rata-rata setiap tahun uang miliaran rupiah dari pemerintah dikururkan untuk pengembangan 200 unit benih padi. Sedang 100 - 120 unit untuk kedelai. "Padi 110 ribu hektar. Kita bantu, kita harapkan mereka bisa jadi produsen. Tapi kenyataannya. Untuk *marketing* mereka sulit. Apalagi kalau program bagi-bagi benih. Apalagi mereka baru."

Tapi Dwi Andreas Santosa, dosen yang juga Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (ABBTI) meragukan klaim itu. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut di Sidoarjo Jawa Tengah tak lebih dari sekedar pepesan kosong. "Kemarin ada petani yang kemudian masuk dalam program yang diceritakan Pak Bambang itu, Program Pemberdayaan Petani Penangkar Benih itu. Teman-teman kami di Sukoharjo sudah mengumpulkan lahan 50 hektar, sudah kumpulkan fasilitas pergudangan dan penjemuran yang luasnya harus satu hektar. Sudah tanam 50 hektar, uang tak keluar sepeser pun. Itu anggota ABBTI satu sen pun. *Bullshit* itu untuk siapa? Itu bukan untuk pemberdayaan petani penangkar benih. Tapi tuntutan pengusaha benih, atau petani pengusaha-lah."

Tahu pemerintah tak bisa diandalkan untuk pengembangan benih pangan nasional, ABBTI nekat untuk bersaing dengan

perusahaan benih raksasa. Lewat Asosiasinya, petani bisa memasarkan benih unggulnya ke petani lain. “Sekarang kita sedang bangun pelan-pelan, ya sudah kita terus terang saja. Benih. Benih apalah! Pandan Wangi atau apa. Lalu varietasnya apa? IF berapa, Indonesian Farmer IF-nya. Sekarang sudah terus terang. Tidak hanya di kalangan sendiri, tapi juga sudah bebas saja di sekitarnya. Kalau tak pernah masuk ke tata niaga untuk apa? Bagaimana kita ke depannya?”

Menurutnya, sekarang adalah waktu yang tepat bagi para petani pemulia untuk mengikis ketergantungannya terhadap perusahaan benih multinasional. Sebab saat ini, dia menaksir 70 - 90 persen pasar benih di Indonesia sudah dikuasai perusahaan raksasa. “Ya kalau kita tak bergerak ke arah sana ya bagaimana kita bisa bersaing. Ya jelas kalah teruslah kita.”

Bagi Andreas, ini menjadi pilihan yang paling mungkin ditempuh para petani agar benih-benih unggul lokal bisa berjaya pada lahan-lahan pertanian di Indonesia.

“Petani ini luar biasa. Kami sedang menguji benih Lentera dari karya petani Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia di Malang. Itu potensi hasilnya 16 ton per hektar. Kalau itu betul, itu revolusi di bidang pertanian pangan karena itu yang dilaporkan itu tertinggi yang pernah ada di Indonesia. Ini menunjukkan ada lompatan yang luar biasa yang dilakukan petani. Teman-teman petani jagung di Kediri, kami bisa buktikan berbeda dengan jagung-jagung yang dimiliki perusahaan. Itu potensinya 12 ton produksi jagungnya. Itu jagung hibrida milik mereka. Lalu kita lihat kedelai Grobogan itu potensinya hampir 4 ton potensinya. Kedelai Grobogan milik siapa? Itu yang dikembangkan petani. Itu artinya apa? Banyak hal kalau pemerintah mau betul-betul berdayakan petani, mau meningkatkan kedaulatan petani maka ini jadi solusi untuk mengatasi pangan di masa depan,” katanya.

Kembali ke Desa Jengkok Indramayu Jawa Barat. Joharipin bersama Kelompok Tani Peduli Karya Petani akan terus memuliakan benih-benih lokal seperti Sriputih, Longong, Gundhil, Rangesel, Jawalara dan juga Marong. Menurutnya, penggunaan benih mandiri menjadi penting agar petani bisa menghemat ongkos bertani. Upaya Joharipin dan Kelompok Peduli Karya Petani tentunya harus didukung pemerintah.

“Ketika ditanam petani lain yang biasa dengan menggunakan benih unggul nasional atau perusahaan dengan pupuk kimia yang tinggi. Dengan benih saya yang biasa lima kuintal, dengan tiga kuintal. Itu sudah bagus produksinya tinggi. Apakah tidak bisa mengurangi ongkos produksi. Dua kuintal itu berapa. Ini kenyataan sudah ditanya teman-teman petani yang menanam. Kemudian menggunakan pestisida yang biasanya menggunakan sepuluh kali sampai panen, dengan gunakan benih saya cuma tiga kali penyemprotan. Tak sepuluh lagi. Sedangkan satu kali penyemprotan biayanya Rp. 200 ribu. Kali sepuluh kali penyemprotan, apakah tidak dua juta,” imbuh Joharipin.

Menyimak celotehan Joharipin, kita patut mengingat pernyataan populer Henry Kissinger. Bekas Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu pernah mengatakan begini; “Menguasai minyak bumi, kamu akan mengontrol negara. Menguasai pangan, kamu akan mengontrol masyarakat”.

Sayang, pernyataan politisi beken itu tak pernah jadi acuan kerja pemerintah.





**Shinta Maharani**

Perempuan kelahiran Banyuwangi, 30 Maret 1985 ini, mempunyai jam terbang tinggi sebagai jurnalis. Mengawali bekerja di Harian Jogja pada tahun 2008, Shinta Maharani kemudian merasakan bekerja di berbagai media, seperti Antara biro DIY, radio Sonora dan sekarang berlabuh di Tempo biro Jateng-DIY. Lulusan S1 Hubungan Internasional, FISIP UPN Veteran Yogyakarta ini pernah meraih berbagai penghargaan jurnalistik, antara lain : Liputan Perubahan Iklim 2014 (AJI Jakarta dan Indonesia Climate Change Trust Fund - ICCTF), Fellowship for Journalists "Better Journalism for Better Environment" 2014 (AJI Indonesia – VVWF Indonesia), Beasiswa Liputan Sustainable Consumption and Production Switch Asia 2014 (Uni Eropa - AJI Yogyakarta), Finalis Diversity Award 2014 (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman), Peraih Beasiswa Liputan Isu Keberagaman 2013 (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman). Selain bekerja sebagai jurnalis Tempo, Shinta Maharani aktif berorganisasi, saat ini menjadi koordinator Divisi Gender Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.

# BELAJAR KE LUMBUNG PANGAN NOL PESTISIDA

Oleh: **SHINTA MAHARANI**

dimuat dalam Tempo.co pada 31 Desember 2014

TEMPO.CO, YOGYAKARTA - Kawananan bebek berjalan keluar dari petak kandang menuju kolam air. Suara mereka riuh. Kandang bebek berada di antara persawahan. Setidaknya 600 bebek mengisi 12 kandang itik. Tak hanya bebek, di kandang itu juga dipelihara kalkun dan *entok*.

Ternak ini berlokasi di kampung pertanian terpadu Joglo Tani di Dusun Mandungan, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung pertanian terpadu ini menempati lahan seluas 5 ribu meter persegi. Perempuan kelompok ternak itik bernama Kambangan Laras Mandiri atau Kalam yang mengelolanya. Saban hari, pada subuh, mereka memanen telur bebek.

Telur itu diambil untuk diolah menjadi telur asin. Sebagian mereka jual ke sejumlah pasar tradisional. Peternak memberi makan bebek dengan adonan bekatul. "Kami juga kasih makan karak atau nasi yang telah dijemur," kata Sekretaris kelompok ternak itik Kambangan Laras Mandiri, Suhartini, 45 tahun, Rabu, 30 Desember 2014.

Dari 600-an bebek di Joglo Tani, 35 ekor di antaranya adalah milik Suhartini. Semula, Suhartini punya 100 ekor bebek. Beberapa hari lalu, ia menjual 65 ekor bebek yang sudah

tidak produktif miliknya, ke pedagang untuk selanjutnya dijual dalam bentuk daging bebek.

Setiap hari, dari 35 ekor bebek milik Suhartini, menghasilkan 25 telur butir. Pedagang secara rutin membelinya dengan harga Rp 1.200 per butir. Keuntungan dari menjual telur Rp 10 ribu per hari. Kelompok ternak itik itu punya sepuluh anggota. Tapi, dari sepuluh itu tinggal dua yang menitipkan bebeknya di Joglo Tani. Sebagian besar dari mereka telah beternak itik di rumah masing-masing.

Selain menjual telur, Suhartini juga menjual bebek miliknya ke pedagang. Harga per ekor bebek berbeda, tergantung umur. Dia mencontohkan untuk bebek yang masih produktif bertelur berharga Rp 75 ribu. Sedangkan, bebek yang berumur tua dan sudah tak menghasilkan telur dihargai Rp 50 ribu-Rp 60 ribu. Ia mendapat keuntungan Rp 40 ribu per ekor bebek yang terjual.

Bagi Suhartini, beternak bebek membantunya secara ekonomi. Suhartini merupakan petani yang punya lahan sawah di sekitar Joglo Tani. Dari beternak bebek itu, ia mendapatkan tambahan penghasilan. "Uang yang masuk sebagian saya gunakan untuk tambahan biaya sekolah dan kuliah anak," kata Suhartini.

Kelompok ternak itik Kambangan Laras Mandiri ada di sana sejak Joglo Tani berdiri pada tahun 2008. Anggota kelompok tani ini setiap dua hari sekali mengolah telur asin dan menjualnya ke pedagang nasi gudeg dan pedagang telur asin.

Penggagas pertanian terpadu Joglo Tani, To Suprpto menyatakan berdasarkan hitungannya, rata-rata terdapat 40 telur dalam satu kandang bebek di kawasan itu per hari. Dari penjualan telur itu, petani masih untung. Mereka hanya perlu

menyiapkan uang untuk membeli pakan bebek.

Setiap pagi hari, kegiatan di kandang bebek adalah mengambil telur, menimbang telur, mengolah telur untuk dijadikan telur asin, dan menjual telur ke pedagang yang datang ke kampung. Dua anggota kelompok ternak bebek itu dibantu oleh mahasiswa yang belajar pertanian terpadu di sana. "Mereka juga memastikan bebek, kandang, dan pakan bebek dalam kondisi baik," kata Suprpto.

To Suprpto merupakan petani yang sukses menerapkan model pertanian terpadu di Joglo Tani. Dia mencatat ada 200-an kelompok tani yang di Indonesia yang mengadopsi contoh pertanian terpadu ini. Misalnya di Riau, Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung.

Di kawasan ini tak hanya ternak itik yang dikembangkan. Ada pula ternak sapi, kambing, dan kelinci. Pohon jati, sengon, padi, sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan empon-empon juga tumbuh subur di kawasan ini. Ikan tawar hidup di kolam yang mengapit rumah utama berbentuk joglo untuk pertemuan kegiatan pertanian di Joglo Tani.

Di kanan-kiri sawah Joglo Tani terdapat perkampungan penduduk. Onggokan jerami menyebarkan bau segar. Bau kotoran bebek dan ayam menyengat. Kandang sapi penuh jerami ada di belakang rumah Joglo. "Kami mengolah kotoran ternak sebagai bahan pupuk organik," kata Ketua Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia ini.

Sistem pertanian terpadu Joglo Tani telah ada sejak tahun 2008. To Suprpto menamainya Joglo Tani yang punya singkatan *ojo gelo dadi wong tani*. Ia membuat sistem itu untuk menunjukkan petani bisa berdaulat dan mandiri terhadap pangan. "Kami ingin meruntuhkan petani sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan," kata dia.

Sistem pertanian Joglo Tani mengambil ide dari sebatang pohon yang tumbuh. Pohon yang punya akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Ini sama halnya dengan pertanian terpadu. Tanaman umbi-umbian, dan padi menggambarkan akar.

Pohon jati menggambarkan batang, daun menggambarkan sayuran, bunga melati dan mawar menggambarkan bunga, dan aneka buah yang menggantung di pohon menggambarkan buahnya. Sedangkan, hewan ternak unggas, sapi, dan kambing merupakan bagian tak terpisahkan dari kesuburan tanah. "Ini bagian dari model lumbung pangan. Tak ada cerita petani kekurangan pangan di sini," kata Suprpto.

Setiap bulan Joglo Tani juga menampung petani, calon petani, dan pekerja yang telah pensiun untuk belajar sistem pertanian terpadu. Mereka belajar tentang mengolah tanah, pemilihan bibit, dan pengolahan pupuk organik dari kotoran ternak itik, kambing, dan sapi. Selain bertani, mereka juga belajar beternak ikan dan unggas. Minat orang untuk tahu tentang Joglo Tani juga tinggi, per bulan jumlah pengunjung sebanyak seribu orang dari berbagai daerah di Indonesia.

Model pertanian organik di sini berkelanjutan. Dia mencontohkan limbah pertanian dan peternakan semuanya tidak ada yang terbuang. Misalnya kulit padi bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Jerami padi juga digunakan untuk pupuk. Sedangkan, limbah dari beternak bisa dimanfaatkan untuk pupuk dan energi listrik. Misalnya air kencing sapi untuk pupuk cair.

Ia mengatakan produk pertanian dan peternakan Joglo Tani bebas pestisida. Kolam ikan Joglo Tani memanfaatkan air dari Sungai Konteng yang berhulu di Gunung Merapi. Aliran air itu masuk ke perkampungan menuju kolam ikan. "Kami

nol pestisida. Kalau tidak pasti meracuni ikan dan unggas,” kata Suprpto.

Kampung ini juga menjadi tempat kuliah bagi mahasiswa dari Aceh hingga Papua. Joglo Tani bekerja sama dengan Institut Pertanian Yogyakarta. Mereka belajar selama empat tahun sama seperti mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi pada umumnya. Saat ini ada 500 mahasiswa yang belajar di sana. Mahasiswa yang lulus biasanya menerapkan praktek sistem pertanian terpadu model Joglo Tani di tempat lain.

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Edhi Martono mengapresiasi usaha kelompok tani maupun individu yang mendorong orang untuk bergairah terhadap pertanian. Ia prihatin selama ini di sejumlah tempat banyak kalangan muda yang tak tertarik menjadi petani.

Mereka lebih tertarik menjadi buruh pabrik di kota. Selain itu, luas lahan pertanian semakin berkurang akibat alih fungsi lahan untuk gedung, toko, perumahan, dan bangunan lainnya. “Padahal pertanian ini vital untuk menjaga ketersediaan pangan Indonesia,” kata dia.

Organisasi non-pemerintah, Aliansi Desa Sejahtera merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2013, menyebutkan Indonesia kehilangan petani sebanyak 5 juta orang. Selain itu, jumlah lahan pertanian semakin menyusut akibat alih fungsi lahan. Laju kehilangan sumber pangan mencapai 6,4 persen atau setara dengan 100 ribu hektare lahan hilang per tahun pada kurun 2003-2013.



**Akbar Tri Kurniawan**

Akbar Tri Kurniawan adalah staf redaksi ekonomi dan bisnis Majalah Tempo. Pria kelahiran Lumajang 26 Februari 1983 ini, sudah malang melintang sebagai jurnalis selama 7 tahun.

# SULIT BERAHI ANCAM SWASEMBADA

Oleh: **AKBARTRI KURNIAWAN**

dimuat dalam Majalah Tempo pada 15 April 2013

*Sapi impor yang didatangkan lewat program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) susah dikembangkan. Peternak kecil dan negara dirugikan.*

**K**ANDANG seluas satu setengah kali lapangan bulu tangkis itu tak lagi berisi sapi. Hanya beberapa tumpukan jerami teronggok di dalam kandang milik Haryono di Desa Campursari, Kecamatan Sidorejo, Magetan, Jawa Timur itu. Sebagian tempat bahkan berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan telur ayam milik peternak itu.

Sebanyak 60 ekor sapi Brahman Cross alias BX bunting pernah berumah di kandang tersebut pada akhir 2010. Sembilan bulan mengandung, 50 ekor berhasil beranak, sisanya mati. Namun sebagian besar bobotnya kurang dari 28 kilogram. Bandingkan dengan bobot pedet lokal jenis peranakan Ongole (PO) yang mencapai 35 hingga 42 kilogram.

Tak puas dengan generasi baru sapi BX miliknya, Haryono memberikan inseminasi buatan (IB) atau kawin suntik agar bunting lagi. Proses IB berulang-ulang 5 sampai 10 kali. Namun sapi asal Australia itu tak kunjung bunting. Ketua kelompok tani Bina Ternak itu pun menyerah. "Saya jual

induk sapi beserta pedet yang jelek itu,” kata pria 56 tahun itu, Rabu pekan lalu.

Menyadari usaha pembibitan sapinya di tepi jurang, Haryono menjual semua induk beserta 38 anaknya Rp 5-6 juta per ekor pada Juni 2012. Ia merugi karena sapi itu ia beli Rp 12 juta per ekor. “Itu pinjam dari bank,” katanya.

Hasil penjualan digunakan untuk ongkos pakan pedet sapi BX yang tersisa 12 ekor yang dinilai masih bagus. Pedet itu ditenakkan di kandang berukuran lebih kecil di sebelah kandang kosong bekas induknya itu.

Sapi BX terkenal rakus karena jumlah pakannya mencapai 10 persen dari bobotnya. Jika tidak cukup kenyang, sapi BX sulit dikawinkan. Sapi impor BX dibeli Haryono setelah mendapatkan Kredit Usaha Pembibitan Sapi dari PT Bank Jatim Rp 1,8 miliar pada akhir 2010.

**M**enteri Pertanian Suswono mengatakan, KUPS merupakan program kementeriannya untuk menambah populasi sapi 1 juta ekor dalam lima tahun atau 200 ribu ekor per tahun. Program yang berjalan sejak September 2009 itu bertujuan mencapai swasembada daging sapi pada 2014.

Untuk mencapai swasembada sapi, pemerintah memilih kebijakan, antara lain, pembatasan impor daging beku dan sapi bakalan, penyelamatan betina produktif, dan menambah populasi sapi. Pembatasan impor dilakukan dengan memberlakukan sistem kuota. Adapun skema penyelamatan yaitu memberikan insentif kepada peternak yang memelihara betina produktif. Realisasi anggaran program ini mencapai Rp 1,3 triliun selama tiga tahun terakhir.

Sedangkan penambahan populasi dengan cara merang-

sang peternak, kelompok peternak, dan perusahaan mengembangkan usaha pembibitan sapi dengan bantuan kredit perbankan berbunga rendah, yakni 5 persen. Inilah yang disebut program KUPS.

Bunga rendah KUPS berasal dari subsidi bunga 6,5 persen yang dibayar negara. Mestinya bunga normal adalah 11,5 persen. Plafon maksimal KUPS sebesar Rp 66,315 miliar. Kementerian Keuangan yang ikut mengatur skema pembiayaan berhasil meneken kerja sama dengan 11 bank yang bersedia menyiapkan anggaran Rp 3,96 triliun.

Bank pelaksana KUPS antara lain Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BPD Jateng, Bank BPD Jatim, Bank BPD Bali, dan Bank BPD NTB. Hingga Februari lalu realisasinya baru mencapai Rp 509,1 miliar kepada 300 kelompok peternak, 14 koperasi, dan 10 perusahaan. “Realisasinya di bawah target,” kata Syukur Iwantoro, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Selasa pekan lalu. Dengan realisasi sebesar itu, bunga yang dibayar negara mencapai Rp 33,1 miliar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2009, peternak yang mendapat pinjaman kredit pembibitan harus membeli sapi impor, peranakan impor, atau sapi lokal. Mengacu pada beleid itu, seharusnya peternak diberi kelonggaran memilih jenis sapi.

Namun praktek di lapangan, seperti dialami Haryono, ibarat bumi dan langit. Haryono disodori persyaratan harus membeli sapi BX dari PT Lembu Jantan Perkasa, perusahaan penggemukan dan pembibitan sekaligus importir sapi Australia. Tidak ada pilihan lain untuk Haryono. “Bahkan saya diantar pegawai Bank Jatim mengambil sapi di kandang importir di Cianjur, Jawa Barat,” katanya.

Nasib serupa dialami Ahmad Ali, ketua kelompok ternak Palagan Rojokoyo, Desa Mbluri, Kecamatan Selokaro, Lamongan, juga di Jawa Timur. Pria 61 tahun itu mendapat pinjaman KUPS Rp 1,5 miliar dari Bank Jatim untuk membeli 100 ekor sapi setelah dirayu oleh pegawai Dinas Peternakan Jawa Timur. "Pegawainya mendatangi saya," katanya.

Ali menjaminkan beberapa aset tanah. Ia juga menekan syarat yang diajukan, yaitu wajib membeli sapi BX di PT Widodo Makmur Perkasa dan PT Lembu Jantan Perkasa. Hal serupa dialami Setiohadi, ketua kelompok Lembu Subur di Desa Tanjungsari, Pacitan, yang mendapatkan kredit Rp 815 juta dari Bank Jatim Cabang Madiun untuk membeli 47 ekor sapi BX dari PT Lembu Jantan.

Belakangan Ali dan Setiohadi mengalami kerugian yang sama seperti Haryono. Sapi bunting yang dibelinya Rp 12-14 juta per ekor itu gagal melahirkan. Mereka terpaksa menjual sapi BX itu sangat murah, yakni di bawah Rp 4 juta per ekor, dan menanggung kredit perbankan. "Saya khawatir agunan saya disita."

Pengucuran kredit juga meruapkan aroma kongkalikong antara pihak perbankan, Kementerian Pertanian, dan importir. Pasalnya, baik Haryono maupun Ali tidak pernah menerima bahkan sekadar melihat dana pinjamannya. Semua ongkos pembelian sapi langsung ditransfer bank kepada PT Widodo Makmur dan PT Lembu Jantan.

Menurut Ali, peternak tidak bisa menolak perintah Tjeppy Daradjatun Soedjana, Direktur Jenderal Peternakan, kala itu, untuk membeli sapi BX dari Widodo Makmur dan Lembu Jantan. Ali juga kecewa kepada kedua importir karena ongkos pengiriman sapi dari kandang importir di Cianjur dan Serang, Banten, sebesar Rp 650 ribu per ekor, dibebankan ke peternak.

“Ini di luar kredit yang mengucur. Kejanggalaan lain adalah peternak tidak pernah menerima polis asuransi yang telah dibayar sebesar Rp 756 ribu per ekor.”

Sumber *Tempo* di Kementerian Pertanian mengatakan, saat KUPS digulirkan, Widodo Makmur dan Lembu Jantan termasuk perusahaan yang banyak mengimpor sapi BX. Melimpahnya sapi impor BX terkait dengan kebijakan Menteri Pertanian Anton Apriantono saat itu untuk membuka keran impor sapi sebebaskan-bebasnya pada 2009. “Membuat sapi impor melimpah dan harga jatuh.”

Maskur, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, membantah mewajibkan peternak membeli sapi BX. “Yang mengarahkan pemerintah pusat, kami hanya fasilitator,” katanya. Djoko Lesmono, Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi PT Bank Jatim, membantah pihaknya mentransfer dana ke importir. “Kami mengirimkan kepada debitor langsung, bukan importir.”

Tjeppy, yang kini menjabat di Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, menyangkal tuduhan itu. “Kami tidak pernah merekomendasikan,” katanya. Toni Wibowo, Direktur Lembu Jantan, menjawab senada. “Kami hanya menjual putus,” katanya. Adapun Giono dari manajemen Widodo Makmur memilih tak berkomentar. “Saya tidak tahu.”

Pengucuran KUPS juga meruapkan aroma korupsi oleh politikus. Sumber *Tempo* di Kementerian Pertanian mengatakan, beberapa politikus daerah menggala peternak untuk membentuk badan usaha dan mengajukan kredit. Politikus broker ini mengurus kredit hingga pembelian sapi di importir tertentu. “Peternak tahu-tahu sudah mendapatkan sapi bibit dan membayar cicilan,” katanya.

Para broker ini diduga kuat mengambil keuntungan

dengan menjual sapi lebih mahal kepada peternak. Dayan Antoni menguatkan modus korupsi broker-peternak ini. Koordinator Dewan Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia ini mengakui pernah dipanggil polisi yang tengah mengusut kasus korupsi pengadaan sapi bibit di Sumatera Selatan. Menurut dia, sang broker menggelembungkan harga sapi bibit BX yang dibeli dari perusahaannya, PT Santoso Agrindo (Santori). “Modusnya memalsukan kuitansi.”

**M**uladno, guru besar pemuliaan dan genetika ternak Institut Pertanian Bogor, mengatakan karut-marut program KUPS karena kegagalan membibitkan sapi BX. Budi daya sapi BX harus dilepas di ladang tanpa diikat, sehingga dibutuhkan lahan yang luas. “Lebih cocok untuk peternakan besar, kelas industri.”

Adapun budi daya pembibitan sapi BX oleh peternak lokal dilakukan di kandang dan diikat. Hasilnya, sapi dilanda stres berat. Ini diperparah dengan suplai pakan dan nutrisi yang buruk. Sapi yang kurus dan stres akan kesulitan mencapai berahi, sehingga tidak bisa dikawinkan, baik secara alami maupun kawin suntik. “Alat reproduksi yang semula bagus menjadi mandul,” kata Muladno. Kesulitan berahi dan fertilitas rendah inilah yang dialami sapi BX milik Haryono, Ali, dan Setiohadhi.

Dayan mengatakan, kegagalan KUPS karena banyak diberikan ke peternak lokal yang tidak mengetahui cara beternak sapi BX. Dayan, yang mengatakan berhasil membibitkan 5.000 ekor sapi BX, menilai kesalahan Kementerian Pertanian adalah tidak memberikan pelatihan cara beternak sapi BX. “Peternak lokal tidak biasa dengan sapi BX.”

Kendati mengakui KUPS gagal, Menteri Suswono enggan

merevisi target swasembada daging. “Kita masih akan mendorong investasi,” katanya. Dayan menilai swasembada daging tahun depan sulit dicapai dengan kebijakan yang sporadis. “Swasembada itu butuh puluhan tahun, bukan kebijakan instan lima tahun.”

Di lapangan, karut-marut kebijakan swasembada sapi membuat Haryono, Ali, Setiohadi, dan peternak kecil lainnya harus menanggung kredit macet miliaran rupiah. “Saya sudah tidak punya uang. Mau dipenjara juga silakan,” kata Setiohadi.

– Akbar Tri Kurniawan, Retno Sulistyowati,  
Ukky Primartantyo (Magetan), Diananta P. Sumedi  
(Surabaya)



**Dimas Rizky Chrisnanda**

Bagi Dimas Rizky Chrisnanda, keluarga menjadi motivasi utama untuk terus berkarya. Pria kelahiran 18 Januari 1987 ini, sudah bekerja di Kantor Berita Radio KBR sejak 2010. Saat ini menjabat sebagai koordinator liputan. Merindu dunia teater yang terlewati dan penikmat fotografi.

# BALADA DAGING SAPI IMPOR

Oleh: **DIMAS RIZKY**

dimuat dalam PortalKBR.com pada 7 Agustus 2013

KBR, JAKARTA - Pemerintah menilai kenaikan harga daging sapi lokal hingga Rp 120 ribu per kilogram jelang Idul Fitri, tak wajar. Tanpa pikir panjang pemerintah segera mengimpor daging sapi asal Australia dengan mimpi harga daging kembali murah. Tapi tak semua pedagang sepakat dengan langkah pemerintah. Reporter Dimas Rizky berkunjung ke pasar tradisional di Jakarta untuk mencari tahu alasan pedagang.

Jauh sebelum ayam berkokok, kegiatan pasar tradisional di kawasan Senen sudah bergeliat. Setiap pedagang bergegas menggelar dagangannya. Di areal penjualan daging, para pedagang mengeluarkan daging segar dari kotak penyimpanan. Tak lama, daging dipotong sesuai ukuran. Para pembeli lantas berdatangan.

Di Pasar Senen juga ada Rohmat, seorang pedagang daging. Beda dengan para pedagang daging lainnya, Rohmat justru mengeluarkan daging beku 21,5 kilogram dari dalam kardus. Di Pasar Senen, hanya dia yang nekat menjual daging impor asal Australia. Alasan dia saat itu, banyak pelanggan yang memesan daging impor darinya.

Menumpuknya pasokan daging sapi impor adalah kerja pemerintah untuk mengatasi tingginya harga daging di

pasaran lokal. Saat harga daging melambung hingga Rp 120 ribu per kilogram, pemerintah menerbitkan izin impor tiga ribu ton daging sapi.

Tapi sebagian pedagang pasar Senen enggan menjual daging sapi impor. Alasan mereka beragam, seperti banyaknya kandungan air pada daging beku, juga banyaknya lemak yang menyebabkan harga jual daging jadi murah. Ketua Pedagang Daging Pasar Senen, Entis mengatakan, mereka kehilangan dua puluh persen berat daging akibat banyaknya kandungan air dan lemak pada daging impor. Alasan lain, adalah pembeli yang lebih suka membeli daging potong segar, ketimbang daging beku asal negeri Kangguru.

Salah seorang pedagang menjelaskan soal kerugian mereka jika menjual daging beku impor. "Ini aja 21,5 kg dari sana. Sekarang tinggal 20,8 kg. Sudah 2 Ons hilang. Ya setengah Kilo lah tekor. Ruginya? Ini aja belum dibersihin lemaknya. Paling sedikit 2 kg hilang. Pertama beli 21,5 kg, hilang setengah kilo, udah dibersihin lagi, 2 kg hilang lemaknya," ujar salah satu pedagang yang enggan disebut namanya.

Di antara hiruk-pikuk kegiatan jual beli di bangsal penjualan daging di Pasar Senen juga ada Tono. Dia merupakan pedagang bakso di Kemayoran yang selalu membeli daging potong segar. "Saya gak mau pakai daging impor. Rasanya gak enak. Jadi sih jadi, tapi rasanya gak enak. Beda aja. Mau harga Rp 60 ribu atau Rp 65 ribu saya gak mau. Orang beli kan cari rasa. Kalau gak enak, buat apa dipaksa. Nanti kabur pembelinya," tambahnya.

Situasi bisnis daging di Pasar Senen ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur. Di sana ratusan pedagang daging justru menunggu glontoran daging impor dari sejumlah pemasok, termasuk Perum Bulog.

Mereka tak mau, kekurangan pasokan karena pembeli daging berlimpah di pasar itu. "Kita gak bos impor dan chanel impor. Tapi kalau ada, kita lihat dulu barangnya dulu, liat dagingnya dulu bagaimana. Jangan sampai nanti silakan beli, tapi gak bisa dijual. Itu sama aja ketahan," ujar salah satu pedagang, Joni.

Pro kontra daging sapi impor ini juga terjadi di daerah di luar Jakarta. Di Jombang, Jawa Timur misalnya, para peternak menolak keberadaan daging luar negeri ini. Salah satu peternak Mohamad Anshori Efendi mengaku tak sanggup menyaingi harga daging sapi impor. "Dengan adanya import yang masuk sudah barang tentu mengejutkan bagi peternak, akhirnya harga jadi amburadul, harga jadi murah. Ya nggak papa harga segitu cuma harus diimbangi dengan harga pakan. Kalau Rp. 75 ribu belum balik modal, nangis peternak jelas gulung tikar," ujarnya.

Menurut pedagang, tingginya harga daging sapi lokal jelang Lebaran adalah wajar. Entis yang sudah berdagang sejak tahun 80an di Pasar Senen mengatakan, harga daging selalu mahal saban jelang lebaran. Semua tak lain karena permintaan pembeli tinggi. Tapi kenaikan itu berbeda untuk tahun ini. "Kalau jaman pak Harto, kenaikan wajar. Tapi yang gak wajar, tahun ini. Dari puasa tahun lalu jadi Rp 62 ribu. Turun lagi normal jadi Rp 60 ribu. Lalu sekarang kenapa naik jadi Rp 75 ribu? Sudah ada kenaikan Rp 15 ribu di dalam 11 bulan. Pedagang kan menjerit," keluhnya.

Karena itu Entis mengaku heran dengan kebijakan pemerintah mendatangkan daging sapi dari Australia. Apalagi dengan dalih jurus meredam harga komoditi pokok itu.

## BALADA DAGING SAPI IMPOR (BAGIAN 2)

**D**i Ibukota Jakarta, pejabat pemerintah menyalahkan peternak atas tingginya harga daging sapi jelang Idul Fitri hingga Rp 120 ribu per kilogram. Menteri Pertanian Suswono beranggapan, para peternak menaikkan harga sepihak, padahal stok ada. Untuk itu, dia meminta peternak untuk menggelontorkan persediaan dagingnya. Dia mencontohkan keadaan itu di Jakarta. “Sebetulnya kalau normal kebutuhan DKI ini 50 ribu ton setahun. Berarti satu bulan rata-rata 4 ribu ton. Tinggal sekarang ini ada kenaikan kebutuhan karena Ramadhan. Nanti kebutuhannya berapa bisa dihitung,” ujarnya. Karena itu dia menilai wajar jika pemerintah mengimpor daging sapi untuk pemenuhan dalam negeri.

Pada awalnya daging impor masuk ke pasar-pasar, harga jual daging turun. Namun beberapa hari jelang Idul Fitri, harga daging kembali melonjak. Dan lagi pemerintah, kembali menyalahkan pedagang. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Sri Sgustina mengatakan, pedagang mengambil untung terlalu besar. “Dua hari ini saya pantau sampai malam di RPH itu harganya sudah Rp 82 ribu. Harganya sudah Rp 62 ribu ditambah ongkos dan sebagainya sebesar Rp 15 ribu itu jatuhnya Rp 82 ribu. Kalau mau ngambil untung lima ribu ya paling 87 ribu. Jadi ini pedagang yang ambil untung terlalu besar. Saya sudah himbau ke PD Pasar Jaya supaya menghimbau para pedagang supaya tidak ambil untung terlalu besar.”

Menanggapi tuduhan pemerintah, para pedagang mengaku terpaksa menaikkan harga daging sapi. Menurut para pedagang, harga jual daging mahal karena tingginya biaya operasional untuk mengambil daging dari rumah potong. Menurut mereka biaya operasional untuk mengambil daging potong mencapai Rp 95 ribu per kilogram.

Namun Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, APDI Asnawi menampik tuduhan pemerintah yang menganggap pedagang mengambil untung terlalu besar. Dia menjelaskan pedagang hanya mengambil untung Rp 5 ribu per Kg. "Kita harus punya modal untuk daging ya dengan segala tetek bengeknya dan lain-lain itu sudah di posisi 93-95 ribu. Itu belum kita jualnya. Kalau kita jual 100 ribu kita cuma untung 5 ribu mas. Siapa yang bilang pedagang ambil untung gede."

Asnawi justru menduga adanya mafia daging yang menanggung untung di balik kisruh melonjaknya daging sapi akhir-akhir ini. Pasalnya, selain mengimpor daging sapi, pemerintah juga mengimpor ribuan sapi hidup. "Masuk lagi 10 ribu katanya kemarin. Tanggal 2 itu, ada beritanya juga. Terus dimana rimbanya sapinya itu? Siapa yang menerimanya? Siapa koordinator distributor impornya? Saya mau tanya itu. Dan di RPH mana dimasukkannya? Pemerintah sudah bagus. Tapi mekanisme pelaksanaannya ini banyak setannya saya bilang," tanyanya dengan kesal.

Dugaan adanya mafia daging juga dilontarkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan pemerintah seharusnya bisa menjual harga daging sapi di bawah Rp 75 ribu per kg. Berdasar data yang dipunya YLKI, Tulus mengatakan harga daging sapi di Australia hanya tiga dollar atau sekitar Rp 30 ribu per kg.

"Mengapa dijual di Indonesia Rp 75 ribu? Jadi sudah 100

persen lebih. Saya kira, dalam mengambil untung sudah tidak rasional lagi karena biaya pokok dan biaya transportasi dan segala macam tidak sampai Rp 75 ribu per Kg,” tanyanya.

Karena itu, Tulus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU turun tangan menyelidiki dugaan korupsi impor daging sapi.

Namun pemerintah tak bergeming. Di tengah karut-marut masalah tersebut, pemerintah justru berencana mendatangkan kembali daging sapi dari luar negeri. Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan impor distop jika harga sudah mencapai Rp 75 ribu per Kg.

Tahu pemerintah berkeras kembali membuka keran impor daging sapi, pedagang dan peternak memprotesnya. Asosiasi yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia bahkan menyebut mereka terancam rugi hingga Rp 1,8 triliun akibat impor daging sapi. Menurut sekjen perhimpunan tersebut, Rochadi Tawaf para peternak sudah terlanjur membeli sapi dengan harga tinggi untuk digemukkan, sebelum disembelih.

“Begini, beli harga pada saat sapi itu 32-33 ribu, misalnya. Kemudian dia harus menjual di harga 35 ribu per kilogram. Berarti, itu gini, bandingkan dengan pada saat menjadi dagingnya itu harus Rp 90 ribu, itu dia akan untung. Tapi, kemudian dengan harga 76 ribu, dia akan turun menjadi harga 29, atau katakanlah 30 ribu, jadi akan ada *loss gain* yang terjadi. Nah, itu kalau dihitung dari 2 juta kontribusi ekor yang diberikan kepada konsumen, maka akan *loss* sekitar Rp1,8 triliun,” jelas Rochadi Tawaf mencontohkan.

Kerugian itu juga yang dialami pedagang pasar tradisional di Pasar Senen. Entis mengaku sudah menjual mobilnya untuk menutup pengeluaran penjualan. “Kita motong rugi,

gak potong juga butuh karena konsumen kan tuntutan juga. Jadi akhirnya, apa yang ada, ya kita banyak tombok. Tahun ini saja saya sudah hilang mobil satu untuk nombokin. Jadi kenaikan seribu perak itu, kita gak bisa langsung naik, harus ada negosiasi dulu. Sementara di penjangalan kabarin naik, kita gak bisa apa-apa. Kita tolak, kita sendiri yang gak dapat barang," ceritanya.

Sementara Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) mengkritik langkah pemerintah yang menurut mereka tak terencana. Ketua ASPIDI, Thomas Sembiring mengatakan kebijakan tersebut sangat terlambat karena dilakukan beberapa hari jelang bulan puasa.

Banyaknya persoalan kebijakan daging sapi, membuat pemerintah membuat terobosan baru dengan mendatangkan sapi siap potong. Namun di mata perhimpunan peternak, langkah itu menunjukkan pemerintah telah gagal total terkait program swasembada daging.

Pengurus Perhimpunan Peternak sapi dan Kerbau Indonesia, Rochadi Tawaf mengatakan tak ada rencana yang jelas yang dibuat pemerintah. "Cetak biru tidak menyebutkan ada Bulog untuk bermain. Jumlahnya dan segala macamnya. Itu nggak ada. Dan Bulog pun kan upaya penyetabilan harga. Jadi kalau Bulog sudah masuk, kebijakan swasembada sudah stop. Saya juga agak khawatir, apa yang terjadi ini, karena kan Bulog tak punya tangan-tangan, penjualan sapi. Jadi, nanti dia menjualnya digelontorin aja," tegasnya.

Pemerintah memang menargetkan Indonesia bakal swasembada daging tahun depan. Namun melihat sengkabut melonjaknya harga daging sapi akhir-akhir ini, target itu ibarat mimpi di siang bolong.



**Akbar Tri Kurniawan**

Akbar Tri Kurniawan adalah staf redaksi ekonomi dan bisnis Majalah Tempo. Pria kelahiran Lumajang 26 Februari 1983 ini, sudah malang melintang sebagai jurnalis selama 7 tahun.

# GULA SILUMAN MENJELANG ROYALAN

Oleh: **AKBARTRI KURNIAWAN**  
dimuat dalam Majalah Tempo pada 4 Agustus 2014

*Harga gula merosot akibat jutaan ton gula untuk industri rembes ke pasar umum. Cara samurai gula melemahkan petani kecil.*

**S**IDANG sengketa impor gula kristal putih hanya berlangsung seperempat jam di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, pada Selasa dua pekan lalu. Ketua Majelis Hakim Haryati menghabiskan waktu hanya untuk membacakan eksepsi tim hukum Kementerian Perdagangan sebagai pihak tergugat.

Gugatan datang dari sepuluh petani tebu asal Kudus dan Pati, Jawa Tengah, yang memperkarakan kebijakan impor 328 ribu ton gula kristal. Penggugat yang berasal dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) itu menilai impor menyebabkan harga gula anjlok. Lelang gula petani ditawarkan pedagang di kisaran Rp 8.250 – 8.551 per kilogram di beberapa pabrik gula. Padahal patokan ongkos produksi ketetapan pemerintah sebesar Rp 8.791.

Tentu pemerintah tak menyerah begitu saja menghadapi gugatan petani. Simon Tumanggor, kuasa hukum Kementerian Perdagangan, dalam eksepsinya mengatakan pengadilan tidak

berwenang memeriksa kebijakan impor. Alasannya izin impor diterbitkan karena keadaan mendesak dan untuk kepentingan publik. “Gugatan kabur, tidak jelas dan sangat sumir,” kata Haryati membacakan isi salinan eksepsi.

Haryati lalu menutup persidangan yang dihadiri delapan orang itu dan meminta tergugat menghadirkan pelaksana impor, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), pada sidang lanjutan 12 Agustus mendatang.

Bagi Muhammad Nur Khabsyin, salah satu penggugat, menempuh jalur hukum merupakan langkah perlawanan kepada pemerintah yang kebijakannya merugikan petani kecil. Impor gula pasir pada April lalu itu dinilai prahara yang bertubi-tubi menerpa petani. Badai awal adalah ketika gula lokal kalah diserang rembesan gula rafinasi industri yang lebih murah Rp 100-200 per kilogram. “Membuat harga terus merosot,” katanya.

Menurut Khabsyin tanda-tanda terjadi rembesan dapat dilacak dari stok gula di Dewan Gula Indonesia. Dalam keadaan normal, stok akhir tahun akan berkurang sebesar angka konsumsi gula yaitu 220 ribu ton per bulan.

Merujuk data Dewan Gula, stok gula mencapai 1,24 juta ton pada akhir Desember 2013. Dengan konsumsi 220 ribu ton per bulan seharusnya stok gula kristal habis pada bulan keenam atau Mei lalu.

Anehnya, sejak awal tahun serapan gula kristal justru melamban. Khabsyin mengatakan berdasarkan catatan Dewan Gula, serapannya hanya 125 - 160 ribu ton setiap bulan. “Bahkan Mei hanya 31 ribu ton. Ini aneh,” katanya.

Apakah konsumsi gula masyarakat turun? Tentu tidak. Rendahnya serapan akibat masyarakat beralih pada gula lain yang tidak terdeteksi sebagai stok Dewan Gula. Gula siluman

itu adalah gula rafinasi untuk kalangan industri yang rembes ke pasar umum.

Gula rafinasi sebagian besar didatangkan lewat importasi. Impor gula diperlukan sebab produksi nasional oleh 62 pabrik gula mencapai 2,5 juta ton, padahal konsumsi nasional mencapai 5 juta ton. Selisih 2,5 juta ton didapatkan lewat impor dari Thailand. Mayoritas gula impor digunakan untuk kebutuhan industri.

Mantan Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia Suryo Alam mengatakan istilah gula rafinasi hanya ada di Indonesia. Gula rafinasi dan gula kristal putih sama saja. Bedanya gula kristal putih dijual di pasar umum ditujukan untuk konsumsi masyarakat. Sedangkan gula rafinasi hanya boleh dijual kepada industri makanan, minuman serta farmasi dan dilarang dijual ke pasar umum. Masalahnya tidak ada pengawasan ketat yang membentengi gula rafinasi tidak bocor.

Rembesan gula rafinasi itu terang benderang ibarat penyakit akut yang sulit disembuhkan. Menurut Direktur Utama pabrik gula Gendhis Multi Manis Lie Kamajaya, rembesan bisa dihitung dari selisih impor gula rafinasi dengan kebutuhan industri. Misalnya realisasi impor gula rafinasi 3,5 juta ton pada 2013. Padahal kebutuhan gula industri berkisar 2,5 juta ton. Artinya, "Hampir satu juta ton yang rembes," katanya.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan menemukan gula rafinasi di pasar tradisional bukan perkara sulit. "Saya menyaksikan sendiri ketika inspeksi mendadak di Pasar Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat," katanya Rabu dua pekan lalu.

Suryo mengatakan gula rafinasi lebih mempesona sebab

selain dibanderol lebih murah juga kualitasnya tinggi sebab lebih kering dan cerah ketimbang gula lokal yang basah dan kecoklatan.

Tahun ini pemerintah menerbitkan izin impor gula rafinasi sebanyak 3,2 juta ton. Sebanyak 2,1 juta ton sudah terealisasi pada semester pertama. Kamajaya mencurigai anjloknya harga gula belakangan akibat rembesan gula rafinasi yang berasal dari volume 2,1 juta ton tersebut.

**B**ELUM reda mengatasi gempuran gula rafinasi, petani tebu dan industri gula dihebohkan langkah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menerbitkan izin impor gula kristal putih kepada Bulog pada April lalu. Alasannya stok gula dinilai menyusut.

Bagi Khabsyin kebijakan impor gula kristal merupakan prahara lanjutan bagi petani tebu. Wakil Sekretaris Jenderal APTRI itu menilai pemerintah menutup mata bahwa masyarakat lebih banyak menyerap gula ilegal ketimbang gula lokal di pasaran.

Akibat menutup mata ini, pemerintah melalui Bulog menganggap stok gula nasional menipis sehingga perlu impor untuk cadangan. Padahal stok masih melimpah akibat tak terserap.

Yang membuat protes membesar karena izin impor terbit pada saat royalan yaitu masa persiapan pabrik-pabrik gula di Jawa menjelang musim giling yang jatuh pada 15 Mei. Bahkan pabrik gula di Sumatera Utara dan Lampung sudah lebih dulu memasuki musim giling pada Februari dan April.

Izin impor sebesar 328 ribu ton gula kristal putih diberikan kepada Bulog untuk jangka waktu 1 April sampai 15 Mei. Sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor 527 2004 gula kristal putih dapat diimpor di luar masa satu bulan sebelum musim giling dimulai dan dua bulan setelah musim giling berakhir. "Pelanggaran aturan inilah yang kami perkarakan di PTUN," kata Khabsyin.

Dalam dokumen izin impor permintaan impor berasal dari Bulog. Seorang anggota asosiasi gula mengatakan Lutfi sebenarnya kurang yakin dengan data kekurangan gula yang disodorkan Bulog dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun Lutfi tak bisa menolak desakan itu. "Ada tekanan politik."

Sebulan setelah izin impor diteken, Lutfi mulai mendapatkan informasi stok gula melimpah. Adapun impor tetap dijalankan kendati Bulog hanya mendatangkan 21.600 ton gula lewat Pelabuhan Belawan, Medan, dan Tanjung Priok, Jakarta pada Mei lalu.

Khabsyin menilai realisasi kecil menunjukkan bahwa perhitungan impor gula pemerintah tidak akurat. Alasan menipisnya stok dianggap hanya akal-akalan.

Jika hitungan kekosongan stok oleh Bulog dan pemerintah akurat. Maka realisasi impor gula yang sedikit itu tentu berdampak buruk yaitu melambungnya harga gula. Kenyataannya tidak. Sebaliknya harga gula justru terus anjlok. "Jadi mengimpor atas asumsi apa?" ujar petani pemilik 20 hektare lahan tebu itu.

Seorang importir gula mengatakan tak kaget dengan ketidakakuratan data pemerintah. Alasannya impor gula lebih dilatarbelakangi kepentingan rente ketimbang mengamankan stok nasional. Impor gula kristal itu dibeli dengan harga Rp 8.000 per kilogram dari Thailand. Dengan harga Rp 8.200 di tingkat distributor di Indonesia, importir tetap meraup keuntungan.

Sebagian besar impor gula di Indonesia dikendalikan segelintir pedagang gula. Pedagang besar ini menguasai hampir 70 persen impor. Mereka dikenal dengan julukan samurai gula yang disebut-sebut punya beking para pejabat tinggi.

Setiap impor gula dari Thailand dapat dipastikan di bawah kendali para samurai ini. Izin impor gula rafinasi misalnya selalu dikantongi perusahaan samurai gula ini. Beberapa di antara mereka bersekutu di bawah Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia.

Kekuatan para samurai ini bukan sekadar dana, namun penguasaan pasar dunia. Eksportir gula di Thailand diduga kuat terafiliasi dengan samurai gula ini. Jadi siapa pun importirnya di Indonesia, ujung-ujungnya akan bertransaksi dengan salah satu dari samurai gula. Begitu juga dengan impor oleh Bulog, diduga kuat masih dalam cengkeraman pedagang besar ini.

Jejak samurai gula ini menapak dalam kebijakan negara yang diteken pejabat tinggi. Kejagalan impor 328 ribu ton diduga kuat beraroma kepentingan rente samurai gula.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui ada desakan untuk impor gula kristal. "Karena perintah Menko Perekonomian, saya tidak mau dipojokkan oleh permasalahan kekurangan," katanya. Belakangan Lutfi menyadari informasi menipisnya stok gula tidak akurat. Namun ia enggan menyalahkan instansi lain. "Tidak ada yang mempengaruhi saya."

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati Kementerian Perekonomian Diah Maulida membantah mendesakkan impor gula. "Kami tidak menentukan atau memutuskan kebijakan," katanya.

Konsumsi Gula Nasional :	5,0 juta ton
Kebutuhan masyarakat :	2,5 juta ton
Kebutuhan industri :	2,5 juta ton
Produksi pabrik lokal :	2,5 juta ton
Impor gula (2013) :	3,5 juta ton

## STOK GULA NASIONAL (TON)

Akhir 2013 :	1.240.157
Januari :	1.080.090
Februari :	935.167
Maret :	786.528
April :	660.803
Mei :	629.220

## PARA PEMAIN IMPOR GULA

NO	PERUSAHAAN	PEMILIK
1	Jawamanis Rafinasi	Martua Sitorus
2	Duta Sugar International	Martua Sitorus
3	Sentra Usahatama Jaya	Kurnadi dan Yayat (almarhum)
4	Permata Dunia Sukses Utama	Edy Kusuma
5	Makasar Tene	Edy Kusuma
6	Dharmapala Usaha Sukses	Olam Group
7	Angel Product	Tomy Winata
8	Sugar Labinta	Ali Sanjaya
9	Adi Karya Gemilang	Sungai Budi Group

SUMBER: DGI, APTRI

Adapun Kepala Bulog Sutarto Ali Muso membantah kecilnya realisasi impor akibat hitungan yang tidak akurat. Jangka waktu yang pendek membuat Bulog kesulitan membeli gula dalam volume besar. Apalagi pasar gula di Thailand ditengarai dikuasai segelintir pedagang kelas dunia. Sutarto balik menuding kelangkaan dan merembesnya gula rafinasi diduga dimainkan kalangan tertentu. “Yang punya pabrik gula rafinasi, dan pedagang gula, cenderung sama,” katanya.

Sedangkan Riyanto B. Yosokumoro, Sekretaris Jenderal Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia, menolak pabrik rafinasi dituding sebagai pelaku perembesan. Terkait tuduhan anggota

Asosiasi bagian dari samurai gula, Johan Setiawan, Wakil Ketua Asosiasi membantah ada hubungan antara Asosiasi dan samurai gula. Johan merupakan Direktur Utama Sentra Usahatama Jaya, produsen gula rafinasi besar yang disebut-sebut salah satu samurai gula. “Silahkan ditanyakan kepada Ketua Umum,” katanya.

– Akbar Tri Kurniawan, Angga Sukma,  
Bernadette Christina, Ayu Prima Sandi,  
Aseanty Pahlevi (Pontianak)





**Mohammad Hilmi Faiq**

Berasal dari bumi Lamongan 24 Agustus 1979, Mohammad Hilmi Fariq sudah bergabung di Harian Kompas sejak 2005. Pernah bertugas di Bandung dan Medan sebelum pindah tugas ke Jakarta sampai sekarang. Dalam perjalanan karirnya, pernah memenangkan beberapa lomba tulis dan foto skala nasional.

KERUSAKAN HUTAN

## KETIKA PETANI SAMOSIR KESULITAN BERTANI

Oleh: **MOHAMMAD HILMI FAIQ**

dimuat dalam Harian Kompas pada 13 November 2013

*Matahari sembunyi di perbukitan dan menyisakan jingga saat Darlin Sagala (41) meninggalkan sawah menuju rumahnya yang berjarak 20 meter, Jumat (8/11). Dia baru saja mengakhiri sesi jaga. Saat padi mulai membunting, para petani di Desa Sikkam Pandan, Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, seperti Darlin, harus siaga berjaga dari serangan hama burung dan banjir yang datang mendadak.*

**B**anjir menjadi pengalaman traumatis bagi petani di Kecamatan Sianjur Mula Mula. Tahun 2011, puluhan hektar padi yang sudah menguning di Desa Sikkam Pandan, Aek Sipitu Dai, Habeahan Naburahan, dan Sari Marihit musnah diterjang banjir. Bahkan, petani di Desa Sari Marihit tak bisa lagi bertani hingga sekarang karena lahan mereka tertutup bebatuan yang dibawa banjir.

Persawahan warga ini terletak di lembah yang dikelilingi perbukitan. Sungai Binanga Bolon dan belasan anak sungai selalu mengalir ke persawahan ini sebelum bermuara ke Danau

Toba yang berjarak sekitar 5 kilometer dari areal persawahan. Ketika banjir datang, areal persawahan ini seperti mangkok yang diguyur air dari ceret.

Para petani, seperti Darlin, tidak pernah bisa beristirahat tenang saat musim hujan datang seperti sekarang. Ketika mendengar gemuruh, mereka buru-buru ke sawah memanen paksa padi agar tidak musnah diterjang banjir. Meski sering kali upaya itu sia-sia lantaran belum waktunya dipanen, kadang banjir juga lebih cepat merendam padi-padi itu daripada tangan para petani yang tak cukup cekatan menyelamatkannya.

“Kadang dalam satu rantai sawah, kami hanya bisa menyelamatkan dua kaleng gabah dari yang semestinya 20 kaleng,” kata Ngotma Limbong (32), petani di Desa Aek Sipitu Dai.

Petani di Sianjur Mula Mula membagi petak sawah dalam bilangan rantai. Satu rantai setara dengan 400 meter persegi yang dapat menghasilkan 20-22 kaleng gabah. Satu kaleng sama dengan 16 kilogram.

## **SERBA SALAH**

Sianjur Mula Mula merupakan lumbung padi bagi Kabupaten Samosir. Sejak ratusan tahun lalu, mereka menanam padi dua kali setahun yang dimulai pada Januari dan Agustus dengan mengandalkan tadah hujan dan irigasi yang bersumber dari Sungai Binanga Bolon.

Mereka sudah dapat memanen padi pada Maret atau April saat padi ditanam pada Januari dan terhindar dari angin kencang yang selalu datang bulan Juni. Jika telat menanam, petani kerap gigit jari karena bulir-bulir padi rontok disapu angin kencang pada Juni.

Pada Agustus, mereka kembali menyemai bibit padi dan memanennya pada November. Meskipun Agustus jarang turun hujan, mereka masih dapat mengandalkan aliran Sungai Binanga Bolon yang selalu memasok air sepanjang tahun.

Namun, itu dulu. Dalam 15 tahun terakhir, pola tanam petani berubah karena alam berubah. Petani mencoba meniasati perubahan alam, tetapi sering kalah. Sawah selalu direndam banjir pada Januari hingga Februari. Hal itu memaksa petani menunda tanam padi hingga Maret. Menjelang panen, petani harus adu cepat dengan angin kencang yang selalu datang pada Juni.

Tahun lalu, Leni Silitonga (34), petani di Sikkam Pandan, hanya menatap nanar batang padi yang ditinggalkan bulir-bulir gabah setelah angin kencang melanda. "Rasanya sia-sia kerja empat bulan," ujarnya.

Sungai Binanga Bolon pun tidak lagi setia. Pada musim kemarau, sungai tak lagi memasok air. Padi yang ditanam pada Agustus seharusnya sudah dapat dipanen pada November. Namun, karena kurang air, panen harus menunggu hujan datang. Akibat kekurangan air itu, produktivitas padi menurun. Dari biasanya menghasilkan 20 kaleng sampai 22 kaleng, kini tinggal 16 kaleng per rantai.

"Sekarang, batang padi kecil dan bulirnya belum gemuk. Padi hanya bertahan hidup, tetapi tidak bisa kembang," ujar Darlin.

## **HUTAN RUSAK**

Perubahan alam itu diyakini petani sebagai dampak dari kerusakan lingkungan, terutama hutan di sekitar Danau Toba. Hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air dibabat perusahaan pengolahan kayu. Air hujan tidak dapat

lagi tersimpan. Akibatnya, saat kemarau, warga mengalami kekeringan dan saat musim hujan, sawah kebanjiran. Puluhan mata air di sekitar Danau Toba pun mati.

Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara Halen Purba menilai, vegetasi yang tersisa di sekitar Danau Toba seluas 12 persen sampai 15 persen dari total luas daerah tangkapan air mencapai 365.800 hektar. Kerusakan tersebut antara lain akibat alih fungsi lahan menjadi hunian, ladang, dan kebun serta perubahan dari hutan alam menjadi hutan tanaman industri (HTI). HTI mengubah tanaman hutan yang heterogen menjadi monokultur, yakni *Eucalyptus*, bahan baku bubur kertas (*pulp*).

Akibatnya, larian (*run off*) air tinggi sebab jumlah pohon dan belukar terus berkurang. Banjir dan kekeringan pun kerap melanda lantaran air tak dapat tersimpan lama di areal hutan.

Tingginya larian air juga terlihat dari permukaan air Toba yang tidak stabil. Awal Juni lalu ketika *Kompas* mengunjungi Samosir, hujan lebat mengguyur hingga 12 jam. Air Danau Toba meluap sampai ke jalan, seperti terlihat di Pangururan, Kabupaten Samosir. Namun, awal November lalu, permukaan air danau menurun 1 meter dibandingkan pada bulan Juni.

Dampak lain kerusakan hutan ialah aneka satwa hutan kehilangan tempat tinggal dan harus berebut dengan warga. Babi hutan, dalam bahasa Batak Toba disebut *ailli*, kerap memakan tanaman warga. *Ailli* tinggal di hutan di perbukitan yang mengelilingi Danau Toba, termasuk di perbukitan Sianjur Mula Mula.

Selain menanam padi, warga di desa-desa Sianjur Mula Mula menanam ubi sebagai bahan pokok makanan. Ubi menjadi tameng ketahanan pangan ketika padi gagal panen, juga sebagai makanan pokok ternak babi.

Namun sejak 10 tahun lalu, *ailli-ailli* itu turun dari bukit-

bukit yang mengelilingi Sianjur Mula Mula, merusak dan memakan ubi yang ditanam warga. Dalam semalam, belasan hektar kebun ubi ludes dimangsa. Belakangan, *aili* tak takut lagi masuk persawahan dan perkebunan pada tengah hari. Hama itu makin agresif.

Serangan *aili* meluas hingga desa lain. Warga tidak lagi berani menanam ubi karena itu sama saja mengundang *aili*. Ubi pun langka dan kini hilang dari Sianjur Mula Mula. Warga harus membeli dari Pangururan, ibu kota Samosir, jika membutuhkan ubi. Itu berarti, kerusakan hutan mengancam kedaulatan pangan warga.



**Muhammad Amin**

Bekerja di Harian Riau Pos, jurnalis ini lahir dari wilayah yang sama, yaitu Pekanbaru, 3 Oktober 1975. Sempat mengecap studi S1 di IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta (1994-1999) dan Pascasarjana IAIN Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru (1999-2001), Muhammad Amin sudah menelurkan beberapa karya buku: *Dilema Demokrasi* (2007), *Mengislamkan Kursi dan Meja* (2009), *Anak-anak Langit* (novel - 2011), *Ayah Keduaku* (novel - 2014)

# INFLASI PANGAN “NEGERI DI AWAN”

Oleh: **MUHAMMAD AMIN**

dimuat dalam [riaupos.co](http://riaupos.co) pada 22 Desember 2014

*Di pinggang Bukit Rimbang dan Bukit Baling, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau terdapat perkampungan yang konon tak pernah diinjak ban sejak negeri ini merdeka. Tapi di sana ada peradaban yang lengkap. Mereka pun hidup dengan tenteram. Namun ketika musim paceklik melanda, kelaparan pun mengancam.*

**K**abut pekat sedang turun memenuhi udara, menyentuh juga aliran Sungai Sebayang yang mengalir cukup deras. Kabut itu seakan menutupi berbagai perkampungan yang tersembunyi di balik perbukitan. Bak negeri di awan, perkampungan itu harus ditembus dengan menyusuri air di antara kabut bersama perahu bermesin tempel. Kabut tebal pun seakan menyatu dengan pinggiran sungai yang sebagiannya berbentuk tebing, menyatu juga dengan aliran airnya.

Kondisinya yang berada di kawasan hutan dan selalu diselimuti kabut tebal membuat kampung-kampung itu tersembunyi bak kawasan “orang Bunian”. Orang bunian adalah sebutan puak Melayu bagi orang-orang di negeri

mahluk halus yang berada di hutan belantara. Jika seorang masuk ke hutan, lalu tersesat dan tiba-tiba ada sebuah kampung, maka kawasan itu biasanya adalah kawasan orang Bunian.

Tapi perkampungan di kawasan aliran Sungai Sebayang bukanlah kampung Bunian. Mereka tetap warga negara biasa. Mereka hanya terperangkap di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling. Akibatnya, mereka tak punya akses lain. Tak boleh ada jalan yang dibangun ke sana karena dikhawatirkan akan merusak kawasan hutan suaka.

Satu-satunya akses menuju tiga desa, yakni Pangkalan Serai, Terusan, dan Salo yang semuanya berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau adalah lewat aliran Sungai Sebayang. Maka keramahan Sungai Sebayang akan menentukan akses ribuan warga tiga desa ini. Jika sungai ini sedang tak bersahabat, maka ancaman kelaparan sudah menunggu.

“Kalau banjir mereka terancam kelaparan. Kalau sungai kering, bisa lebih parah,” ujar Camat Kampar Kiri Hulu, Nuzum Ashal, Senin (15/12).

Musim hujan seperti pada November-Desember ini adalah masa sulit bagi masyarakat di aliran Sungai Sebayang. Sebab, aliran Sungai Sebayang berubah ganas dan deras. Perahu kecil dengan lebar sekitar 75 cm dan panjang 8 meter tak akan mampu melewati arusnya yang deras dan penuh batu. Tukang robin (sebutan untuk pengemudi perahu bermesin tempel merek robin) biasanya akan menyerah dan memilih menunggu arus tenang daripada memaksakan diri dengan risiko perahunya pecah berkecai. Walaupun sebenarnya mereka sudah sangat ahli dan paham di mana batu, tebing, cadas dan pusaran air

berada, mereka akan memilih menunggu.

“Kalau musim hujan, bisa sepekan tak ada akses ke desa-desa itu,” ujar Nuzum.

Pada tahun 2007 dan 2011 terjadi banjir bandang yang cukup parah di kawasan ini. Banjir menyebabkan terisolasinya beberapa desa ini selama satu hingga dua pekan. Ancaman kelaparan sempat melanda mereka sampai kemudian arus sungai kembali normal.

Kondisi yang lebih buruk bisa terjadi di musim kering. Jika kering dan panas makin parah, maka akses ke desa-desa itu bisa terputus hingga berbulan-bulan. Musim kering parah sempat terjadi pada tahun 1997. Musim kering itu menyebabkan air Sungai Sebayang kering selama enam bulan. Akibatnya, masyarakat sekitar benar-benar menderita kelaparan. Mereka tak mendapatkan akses makanan sama sekali. Mereka mulai mencari makanan hanya dari hasil hutan, umbi-umbian. Beruntung ada bantuan dari pemerintah yang diberikan lewat udara melalui helikopter, sehingga tak ada warga yang tewas akibat kelaparan kala itu.

## **INFLASI PANGAN**

Perjalanan menuju Desa Pangkalan Serai, batas terakhir aliran Sungai Sebayang di Provinsi Riau beberapa waktu lalu terasa melelahkan. Diperlukan waktu sekitar 3,5 jam untuk menempuh jarak 38 km dari Desa Gema, ibukota Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang merupakan akses terdekat. Seluruhnya ditempuh dengan perahu kecil bermesin tempel merek robin. Setelah Pangkalan Serai, hanya ada belantara, dan batas wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Desa terdekat adalah Desa Buluh Kasok, Kecamatan Taram, Kabupaten 50 Kota, Sumbar. Medannya sangat berat, melewati kawasan Bukit Barisan dan

menembusnya perlu waktu sehari.

Jauhnya jarak tempuh dan kondisi medan berat tentu saja berdampak pada kehidupan masyarakat di Desa Pangkalan Serai. Sekretaris Desa Pangkalan Serai, Marsani mengakui kepada riaupos.co bahwa telah terjadi inflasi lokal di tempat mereka. Beberapa komoditas bahan pangan telah menjadi barang mewah. Tapi dia tak ragu menyuguhkan barang segelas teh.

“Semua bahan pangan memang menjadi sangat mahal di sini. Beginilah adanya kampung kami,” ujar Marsani, lalu menawarkan minum teh hangat.

Di desa berpenduduk 112 KK atau 554 jiwa itu, harga seikat bayam bisa mencapai 7 ribu rupiah hingga 10 ribu rupiah. Harga itu bisa dua kali hingga tiga kali lipat dari harga di Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, atau dua kali lipat harga sayuran di Lipat Kain, salah satu kota kecil di Kampar Kiri. Di Pekanbaru, harga seikat bayam hanya 2 ribu rupiah. Harga bahan pangan lainnya pun sama saja. Harga beras bisa mencapai dua kali lipat dibanding harga pasar. Begitu juga harga-bahan pangan yang tak bisa “diproduksi” di Pangkalan Serai ini, mulai dari ikan asin, ikan teri, salai, minyak goreng, gula, tepung, kacang, telur, ayam ras, susu, kopi, teh, tempe, tahu, tauge dan lainnya. Semuanya menjadi serba mahal karena jarak tempuh dan biaya angkut yang tinggi.

Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) menjadikan tekanan harga di kawasan ini juga makin berat. Sebagai catatan, harga sewa perahu robin bermesin tempel dari Desa Gema ke Desa Pangkalan Serai mencapai 1 juta rupiah hingga 1,2 juta rupiah. Jika tukang robin menarik ongkos per kepala, maka tak kurang 250 ribu rupiah harus dikeluarkan. Inilah yang menyebabkan harga-harga menjadi mahal, dan kadang warga harus menahan

diri untuk mengkonsumsi bahan pangan tertentu.

“Kami bukan tak ada duit. Duit itu ada, tapi memang di sini semua serba mahal,” ujar Marsani.

Mereka memang punya uang dari penghasilan sebagai petani-pekebun. Tapi uang itu menjadi tak bernilai karena harga barang yang melambung tinggi saat tiba di kampung mereka. Hampir seluruh penduduk desa ini mencari nafkah dengan cara berkebun karet. Di antara mereka ada yang memiliki kebun antara dua hingga tiga hektare. Ada juga yang berkebun sedikit, bahkan ada yang hanya sebagai pekerja saja. Dari karetlah pendapatan utama mereka yang menyebabkan mereka mampu bertahan.

Kawasan Desa Pangkalan Serai sebenarnya termasuk “desa ilegal”, karena berada di dalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Seharusnya tak boleh ada aktivitas perkebunan di sana. Akan tetapi, ternyata masyarakat sudah berdiam di kawasan ini sebelum penetapan kawasan dilakukan. Kabarnya, sejak masa Belanda mereka sudah berdiam di kawasan ini. Bukti kuburan-kuburan tua adalah pertanda yang tak terbantahkan.

Adalah SK Menhut No 173/kpts-II/1986 tanggal 6 juni 1986 perihal Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling yang kemudian menjadikan mereka terus terisolir. SK ini memasukkan juga desa-desa di aliran Sungai Sebayang ini dalam petanya. Sebelumnya pada tahun 1982, melalui SK Gubernur Riau No 149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982, telah direkomendasikan penetapan Suaka Margasatwa dengan luas 136 ribu hektare ini.

Kondisi ini membuat mereka seakan terkepung selamanya dalam SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Tapi, hidup harus tetap berjalan. Maka mereka pun memilih bertahan di dalam hutan

ini kendati pemerintah bersikukuh tak akan membuatkan akses jalan untuk desa-desa ini. Walaupun demikian, pembangunan di desa-desa di perkampungan suaka ini tetap berjalan. Tetap ada sekolah, masjid, bahkan listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Mereka benar-benar masyarakat yang utuh, berperadaban, walau tersembunyi di antara dua bukit, di dalam belantara. Hanya akses jalan yang tak dimiliki ke dunia luar.

Sebenarnya ada usaha yang dilakukan Bupati Kampar Jefry Noer untuk membuka akses jalan dari Desa Gema ke beberapa desa di sepanjang Sungai Sebayang. Akses jalan darat yang dibuka itu melalui Desa Tanjung Belit, Muara Bio, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Gajah Bertalut dan Aur Kuning. Rintisan jalan ini terputus dan tak sampai ke tiga desa lainnya yakni Terusan, Salo dan Pangkalan Serai. Usaha pembuatan jalan dihentikan Kemenhut RI atas pertimbangan untuk melindungi SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Akses jalan itu akhirnya dibiarkan terbengkalai begitu saja. Akses jalan itu hanya bisa dijadikan jalan setapak.

Sebagai solusi sementara, warga tetap melanjutkan hidup dengan berkebun dan mencari hasil hutan. Perkebunan karet memang terhampar di hampir semua ruas tepian Sungai Sebayang. Kondisi perbukitan yang terjal tak menghalangi mereka berkebun di setiap jengkal tepian sungai ini. Kontur tanah di sekitar sungai memang berbentuk cekungan. Sebagian tepian sungai berbentuk landai, namun kemudian diikuti dengan kontur berbukit di sepanjang sungai. Cekungan dan bukit pun menghiasi pemandangan khas sepanjang sungai ini. Bagian yang landailah yang kemudian dijadikan perkampungan, sedangkan sisanya jadi lahan perkebunan.

Kebun karet warga terbentang cukup jauh bahkan hingga

jarak 1 km dari pusat desa. Dari bibir sungai, rata-rata kebun ini berada hingga 100 meter ke dalam hutan. Selain berkebun karet, beberapa tanaman keras juga mereka tanam. Durian, rambutan, hingga petai merupakan tanaman lain selain karet.

“Sayur-sayuran yang tak cocok di sini. Semuanya dari luar,” sebut Marsani.

Dari berkebun karet, penghasilan rata-rata masyarakat sudah cukup untuk menghidupi mereka. Disebutkan seorang warga, Wasli, rata-rata seorang pria dewasa bisa menakik getah yang menghasilkan sebanyak 10 kg per hari. Terkadang, tak hanya pria saja yang menakik getah, melainkan juga istri dan anak-anak yang mulai beranjak dewasa. Dengan demikian satu keluarga dapat menghasilkan getah ojol lebih banyak, bahkan hingga dua kali lipat. Ada yang pergi-pulang setiap hari sambil mengantar-jemput anak sekolah, ada juga yang mandah atau menginap di pondok-pondok sekitar perkebunan karena lokasi yang jauh.

Biasanya, setelah karet terkumpul, ada beberapa orang yang rutin membeli atau mengantarkan karet ojol itu di Desa Gema, ibu kota Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Karet-karet ojol itu dibawa di dalam perahu dan sebagian yang lainnya diseret di permukaan air. Hari Kamis sebagai hari pasar adalah rutin penjualan karet ojol sekaligus membeli barang harian warga.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga berusaha menanam apa yang bisa tumbuh, mulai cabai, sayuran merambat seperti pitulo, hingga berbagai bumbu dapur seperti kunyit, lengkuas, atau apa yang bisa tumbuh untuk dimakan. Hanya sayur-sayuran hijau yang tak bisa tumbuh di sini. Mereka sudah mencobanya, tapi gagal.

Mereka juga memelihara ayam kampung dan kambing untuk menjaga ketahanan pangan dari sisi protein. Tapi

kambing relatif sulit berkembang karena makanan dan kontur tanah yang tak cocok. Sapi dan kerbau sama sekali tak ada. Di beberapa desa lain yang berdekatan dengan Desa Gema, ada juga warga yang memelihara kerbau. Hewan besar ini bisa dibawa menyusuri Sungai Sebayang dan memeliharanya cukup mudah. Ini berbeda dengan kambing dan ayam yang harus dibawa dengan perahu. Sedangkan sapi tak memungkinkan sama sekali.

Secara umum, jika hanya terputus akses selama sepekan, mereka belum akan kelaparan. Tapi kekeringan merupakan bencana paling menakutkan bagi warga seperti yang terjadi pada tahun 1997. Ada trauma berat pada mereka sehingga bencana itu diharapkan tak terjadi lagi.

“Kami tak ingin peristiwa seperti itu terjadi lagi. Kami benar-benar terancam kelaparan dan bisa mati secara massal di sini,” ujar Wasli, salah seorang warga Desa Pangkalan Serai.

Menurut Camat Kampar Kiri Hulu, Nuzum Ashal, mereka selalu siap siaga jika terjadi bencana serupa. Koordinasi dengan BPBD Kampar dan Riau juga selalu dilaksanakan. Makanya kepada warga juga diminta menjaga ketahanan pangan di wilayahnya. Soal harga yang melonjak, sebenarnya, kata Nuzum, sudah dilakukan antisipasi. Caranya adalah dengan membuat ketetapan bahwa peningkatan harga hanya dibolehkan Rp1.000 per kilogram. Camat sudah minta kepada kepala desa untuk mengawasinya.

“Tapi yang namanya masyarakat dan pedagang, sulit mengawasinya satu per satu. Apalagi sejak kenaikan BBM ini, semuanya jadi serba lebih mahal dan susah dikendalikan,” ujarnya.

Semua antisipasi ketahanan pangan yang disiapkan tentu saja tak berjalan permanen selagi akses mereka terus ditutup

demi menjaga kelestarian hutan. Mereka hidup di alam mereka sendiri yang berbeda dengan sebagian besar masyarakat. Antara lain, mereka tak akan bisa menikmati bahan makanan seperti halnya warga lainnya, baik keanekaragamannya maupun harganya. Mereka dekat, tetapi seakan jauh, bak berada pada negeri di awan, negeri kaum Bunian.



# KATEGORI FOTO

## NOMINASI:

### **Terdesak Pasar Modern**

Karya: Raditya Mahendra Yasa ..... 123

### **Menjadi Pemukiman**

Karya: Arif Nugroho ..... 125

### **Menipisnya Lahan Pertanian**

Karya: Shofan Kurniawan ..... 127

### **Tradisi Lamporan**

Karya: Raditya Mahendra Yasa ..... 129

### **Gotong Royong Menanam Padi Lokal**

Karya: Wawan Hadi Prabowo ..... 131

### **Petani Gunung**

Karya: Arif Nugroho ..... 133

### **Para Pencari Air**

Karya: Bahauddin Raja Baso ..... 135

### **Sundried**

Karya: Boy T Harjanto ..... 137

### **Kentang Dieng Terdesak Kentang Cina-3**

Karya: Aris Andrianto ..... 139

### **Pelangi Pangan di Tanah Ringkai – I**

Karya: Feri Latief ..... 141

## PEMENANG TERBAIK:

### **Terdesak Pasar Modern**

Karya: Raditya Mahendra Yasa



**Raditya Mahendra Yasa**  
Pria kelahiran Yogyakarta, 13 November 1979 adalah jurnalis Harian Kompas yang juga bekerja dan tinggal di Yogyakarta.



## TERDESAK PASAR MODERN

Oleh: **RADITYA MAHENDRA YASA**  
dimuat dalam Harian Kompas pada 3 Februari 2012

Warga menggembalakan kerbau di sekitar lahan yang telah dikapling untuk bangunan minimarket di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/2). Tanpa ada pengaturan dari pemerintah daerah berkembangnya minimarket hingga pelosok desa tersebut dikhawatirkan mengancam keberadaan pasar tradisional dan kios-kios kecil di sekitarnya.



**Arif Nugroho**

Fotografer Koran Sindo ini, tinggal dan bekerja di wilayah Semarang. Tidak jauh dari tanah asalnya di Demak, pria ini terlahir pada 14 Desember 1980.



## MENJADI PEMUKIMAN

Oleh: **ARIF NUGROHO**

dimuat dalam Koran Sindo Edisi Jawa Tengah pada 13 Oktober 2013

SEMARANG - Aktivitas pengurukan lahan pertanian untuk dijadikan pemukiman mewah di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Alih fungsi lahan pertanian yang berlangsung masif membuat hasil panen di wilayah ini terus mengalami penyusutan.



Muhammad Sofan Kurniawan  
Fotografer di Radar Mojokerto (grup Jawapos) ini adalah putra daerah dari Gresik pada 27 Oktober 1984.



## MENIPISNYA LAHAN PERTANIAN

Oleh: **SHOFAN KURNIAWAN**

dimuat dalam Jawa Pos Radar Mojokerto pada 1 Desember 2013

Dua orang petani melakukan aktifitas di lahan jagung di atas Tambang Galian pasir batu di desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto (28/11/2013), terdapat ratusan hektar lahan pertanian yang rusak akibat eksplorasi tambang galian pasir batu di wilayah tersebut, pemerintah setempat dinilai belum maksimal dalam mengeluarkan peraturan eksploitasi tambang, selain mengurangi lahan produktif kegiatan tambang pasir batu tersebut juga dapat memicu terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir.



**Raditya Mahendra Yasa**  
Pria kelahiran Yogyakarta, 13 November 1979 adalah jurnalis Harian Kompas yang juga bekerja dan tinggal di Yogyakarta.



## TRADISI LAMPORAN

Oleh: **RADITYA MAHENDRA YASA**  
dimuat dalam Harian Kompas pada 9 Oktober 2014

Warga menggelar tradisi Lamporan yang biasa dilakukan warga sebelum memasuki masa tanam di Omah Sonokeling, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (3/10). Tradisi ini sebagai wujud doa warga setempat yang bekerja sebagai petani agar terhindar dari serangan hama. Untuk saat ini mereka tidak hanya berhadapan dengan hama tanaman tetapi juga ancaman kerusakan lingkungan dari rencana pembangunan pabrik semen di kawasan itu.



**Wawan Hadi Prabowo**

Fotografer Harian Kompas ini terlahir di Surakarta, 15-05-1980 dan sekarang sedang bertugas di Jakarta. Berbagai penghargaan sudah pernah diraih, yaitu: Juara pertama Lomba Foto XL Award 2007; Juara Dua Lomba Cigna Photo 2008; Juara Pertama dan Kedua Kereta Api Indonesia Photo Contes 2009; Walikota Yogyakarta Award 2010; Juara Pertama Lomba Foto Bank Indonesia 2011; Nominasi Adinegoro Award 2011; Medali Emas Wan-Ifra, Asia-Pacific Media Award, India, 2013



## GOTONG ROYONG MENANAM PADI LOKAL

Oleh: **WAWAN HADI PRABOWO**  
dimuat dalam *Harian Kompas* pada 18 November 2012

Warga Kampung Adat Ciptagelar bergotong royong menanam padi lokal di areal persawahan Dusun Sukamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (16/11). Benih padi lokal yang ditanam adalah salah satu warisan para leluhur mereka yang hingga kini masih tetap lestari.



**Arif Nugroho**

Fotografer Koran Sindo ini, tinggal dan bekerja di wilayah Semarang. Tidak jauh dari tanah asalnya di Demak, pria ini terlahir pada 14 Desember 1980.



## PETANI GUNUNG

Oleh: **ARIF NUGROHO**

dimuat dalam Koran Sindo Edisi Jawa Tengah pada 13 Oktober 2013

TEMANGGUNG - Petani membawa pupuk kandang di lahan kentang miliknya di lereng Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah (1/1-2013). Para petani di nusantara perlu didorong untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida guna mengurangi efek buruk jangka panjangnya.



**Bahauddin Raja Baso**

Pria kelahiran Makassar, 26 Juni 1981 ini merupakan jurnalis di Harian Fajar, Makassar.



## PARA PENCARI AIR

Oleh: **BAHAUDDIN RAJA BASO**

dimuat dalam Fajar Makassar pada 26 Desember 2014

Beberapa perempuan di desa Bontoa, Kabupaten Maros menjunjung air dari sumber air yang cukup jauh dari lokasi pemukiman mereka. Krisis air yang berkepanjangan kini mengancam sejumlah daerah di Indonesia. Krisis air juga berdampak gagalnya panen di sejumlah lahan pertanian yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan.



**Boy T Harjanto**

Jurnalis yang terlahir pada 16 Januari 1974, bekerja di harian Jakarta Globe. Mengenal fotografi di Institut Seni Indonesia ( ISI/STSI) Solo 1995-1999. Lalu mengawali karir menjadi juru foto amatiran hingga 2001, berlanjut bekerja di Harian Umum Bengawan Pos hingga 2003, bekerja di Harian Pagi Indopos hingga 2009 dan saat ini di Jakarta Globe Newspaper.



## SUNDRIED

Oleh: **BOYT HARJANTO**

dimuat dalam Jakarta Globe pada 14 September 2013

A Farmer spreads out unhusked rice at the Plaosan Temple compound in Klaten, Central Java, on Friday. Rice farmers need to dry their rice grains to help reduce the crop's water content, which will in turn make for higher quality rice.



**Aris Andrianto**

Ketua AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Purwokerto ini merupakan koresponden Tempo untuk wilayah Banyumas. Pria tamatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman juga terlahir di bumi Banyumas pada 26 Juni 1981.



## KENTANG DIENG TERDESAK KENTANG CINA -3

Oleh: **ARIS ANDRIANTO**

dimuat dalam Tempo.co pada 3 Juli 2012

Para petani di Desa Karang Tengah Dataran Tinggi Dieng sedang memanen kentang, Rabu (3/7). Harga kentang kualitas super saat ini hanya Rp 4.000 perkilogram, turun dibandingkan tiga bulan lalu yang dijual Rp 8.000 perkilogram, akibat masuknya kentang impor dari Cina.



**Feri Latief**

Fotografer lepas yang karyanya sudah banyak tayang di media, seperti National Geographic Indonesia, Reader's Digest Indonesia, TEMPO, KOMPAS dll. Tamatan jurusan arsitektur ITENAS (Institut Teknologi Nasional) Bandung ini , sudah sering mendapat penghargaan, antara lain : Beasiswa WWF – AJI Indonesia "Better Journalism for Better Environment" 2014 ; Beasiswa dari ILO 2013 : "Women's equality in the workplace" ; Pemenang pertama Green Industry Photo Contest in Indonesia 2013 ; Pemenang pertama Unity and Diversity Photo Contest in Indonesia 2012 ; Pemenang pertama

BTPN Photo Contest in Indonesia 2012 ; Penghargaan Apresiasi Jurnalis Jakarta 2010.



## PELANGI PANGAN DI TANAH RINGKAI – I

Oleh: **FERI LATIEF**

dimuat dalam Jelajah.id pada 22 Desember 2014

Maria Loretha, menunjukan hasil panen sorghum perdana kelompok tani binaannya di Tanjung Bunga, Flores Timur, NTT. Perempuan berusia 46 tahun yang akrab dipanggil Mama Tata ini dengan usahanya tak kenal lelah berhasil mengembangkan bibit asli pangan lokal. Usahanya mulai memperlihatkan hasil, banyak petani di Nusa Tenggara Timur memulai lagi menanam pangan lokal yang dulu sempat hilang dari peredaran.